

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN  
(PNPM – PPK 2007)

---



# LAPORAN BULANAN

## September 2007



---

**Konsultan Manajemen Nasional**

Jl. Pejaten Raya Pasar Minggu, Graha Pejaten No. 2  
Jakarta Selatan

Telp. +62 21 7988940, 7988918 / Fax +62 21 7974712

Email: [kontak@ppk.or.id](mailto:kontak@ppk.or.id)

Website: [www.ppk.or.id](http://www.ppk.or.id)

Keterangan Foto:

Foto Atas: Bak Air & Perpipaan di Desa Siwar kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

(dari kiri ke kanan):

1. Peserta Musyawarah Antar Desa II (MAD II) kecamatan Manduamas kabupaten Tapanuli Tengah-Sumut sedang mengikuti musyawarah kelompok membahas usulan yang akan didanai PNPM-PPK
2. Sarana Jembatan Gantung yang dibangun PPK di Desa Bumbung Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara.
3. Kegiatan prasarana pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan awal jembatan gelagar besi bentang 12 m di kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya- Sumatera Barat.

# I. PENDAHULUAN

---

Agenda September 2007 lebih banyak difokuskan pada supervisi implementasi IST di lapangan terutama tingkat kabupaten. Sementara itu, rekrutmen di beberapa provinsi dilakukan untuk mengisi kekosongan terkait adanya perubahan struktur di KM-Nasional maupun Provinsi.

## I.1. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan PNPM-PPK 2007 yang efektif telah dimulai sejak Mei 2007, namun hingga saat ini masih dalam tahap melengkapi item-item pendukung terlaksananya kegiatan seperti: komitmen dana cost sharing pemda, terbitnya DIPA, pencairan DOK, dan ketersediaan fasilitator maupun konsultan. Namun demikian, kegiatan tetap dijalankan sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi.

Ketersediaan fasilitator menjadi masalah yang cukup menghambat pelaksanaan kegiatan. Walaupun telah dilakukan rekrutmen dan pelatihan selama dua gelombang, kekosongan masih tetap terjadi terutama kekosongan Fasilitator Teknik (FT). Untuk itu, atas hasil konsultasi dengan Bank Dunia, Satker Pusat memberikan kebijakan rekrutmen kembali dengan penurunan kualifikasi pengalaman (0 - 3 tahun). Hasilnya, sebanyak 25 provinsi (kecuali: NAD, DIY, Bali, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat) berhasil menjangkau calon FK/FT yang selanjutnya dilakukan Pelatihan Pratugas (sesuai prosedur rekrutmen) Gelombang III untuk menentukan kelulusan calon FK/FT tersebut. Pelatihan tidak diselenggarakan di ke-25 provinsi tersebut, akan tetapi untuk efisiensi dan efektivitas, beberapa provinsi digabung sehingga pelatihan tersebut terselenggara di 12 provinsi pada akhir September 2007.

Kegiatan IST tambahan bagi KM-Kabupaten/KM-Teknik maupun FK/FT yang dimulai sejak Agustus 2007, pelaksanaannya dievaluasi oleh Unit Training. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa provinsi dinilai belum melaksanakan IST sesuai dengan panduan yang diberikan dan belum tampak kesesuaian agenda dengan matriks kurikulum yang direncanakan. Adapun pelaksanaan IST secara umum masih di tingkat provinsi (untuk KM-Kabupaten), sedangkan IST tingkat kabupaten (untuk FK/FT) belum seluruhnya terselenggara bahkan kurikulumnya belum tersedia. Dengan demikian pada bulan ini, supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan IST difokuskan pada IST tingkat kabupaten.

Meninjau perkembangan penyerapan dana Kategori 2 (DOK), hingga akhir September 2007 Unit Keuangan dan Anggaran mencatat bahwa DOK Perencanaan telah terserap sebesar Rp36,04 miliar atau 41% dari total alokasi. Adapun DOK Pelatihan Masyarakat telah dicairkan sebanyak Rp1,49 miliar (4% dari alokasi) oleh 5 provinsi (NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat). Proses pencairan DOK di beberapa lokasi masih mengalami kendala walaupun telah terbit SPB sejak bulan Agustus lalu. Hal ini cukup menghambat pelaksanaan di lapangan, mengingat masyarakat membutuhkan dana tersebut untuk melakukan kegiatan perencanaan.

Berbagai kendala yang dihadapi tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi demi mencapai target sesuai dengan RKT. Jaminan kualitas pelaksanaan kegiatan masih



menjadi pertanyaan. Untuk itu, KM-Nasional perlu terus melakukan monitoring dan dukungan bimbingan maupun moril agar pelaku di lapangan tetap konsisten dengan pemberdayaan masyarakat. Gambaran perkembangan kegiatan PNPM-PPK 2007 berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dicapai menunjukkan bahwa hingga September 2007 telah berhasil dilakukan pencairan dana cost sharing Pemda di 212 kecamatan (29 kecamatan diantaranya belum cair 100%) dan dana APBN telah tercairkan di 23 kecamatan. Total dana yang tercairkan masing-masing sebesar Rp47,70 miliar dan Rp5,85 miliar. Sementara itu, MAD II telah dilakukan di 1.182 kec. atau 64% dan MAD III telah dituntaskan di 780 (40%) kecamatan dari 1.719 kecamatan partisipasi.

Walaupun fokus perhatian lebih banyak pada PNPM-PPK 2007, kegiatan PPK fase sebelumnya masih dipantau perkembangannya karena beberapa desa belum dapat menuntaskan kegiatan. Untuk kegiatan PPK II (Siklus IV - VI) masih tersisa 2 desa di 1 kecamatan Siklus IV, sedangkan Siklus V dan VI seluruh desa telah MDST. Sedangkan kegiatan PPK III/A tahun I (Siklus VII) telah dituntaskan 100% di semua lokasi. Sementara itu, kegiatan PPK III/A tahun II (Siklus VIII) dan PPK III/A tahun I (Siklus IX) masing-masing masih belum MDST di 23 kecamatan/30 desa dan 16 kecamatan/22 desa. Untuk mempercepat pelaksanaan MDST di semua lokasi, memorandum percepatan pelaksanaan MDST atau MD Khusus untuk lokasi yang tidak memungkinkan MDST tengah dipersiapkan.

Gempa tektonik berkekuatan 7,9 skala richter di provinsi Sumatera Barat (kab. Pesisir Selatan dan Kep. Mentawai) dan Bengkulu (kab. Bengkulu Utara dan Muko Muko) pada medio September 2007 telah membuat ribuan rumah dan fasilitas umum porak poranda. Sejumlah lokasi PPK di kedua provinsi tersebut tak luput dari sasaran gempa. Pasca gempa, KM-Nasional melakukan kunjungan ke provinsi Bengkulu untuk meninjau secara langsung kondisi di provinsi yang baru tergabung dalam program ini. Akibat kejadian ini, untuk sementara proses fasilitasi masyarakat di kab. Bengkulu Utara (4 kecamatan) dan Muko Muko (4 kecamatan) dihentikan mengingat kondisi psikologis dan sosial masyarakat pasca gempa. Adapun konsultan dan fasilitator difokuskan untuk membantu Satkorlak dan mengidentifikasi kerusakan.

## I.2. KEGIATAN SEPTEMBER 2007

Dalam rangka menunaikan amanat Rakornas Juli 2007 yaitu salah satunya adalah pelatihan tambahan berupa IST untuk KM-Kab./KMT dan FK/FT, mulai Agustus 2007 dilakukan IST yang waktunya bersamaan dengan Rakor Provinsi ataupun Rakor Kabupaten. Untuk memastikan agar kegiatan terlaksana dan sesuai dengan tujuan, KM-Nasional melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan tersebut di beberapa provinsi yang dipandang memerlukan pendampingan. Akibatnya, supervisi dan monitoring IST menjadi agenda yang dominan pada bulan ini. Selain supervisi IST, kegiatan sosialisasi P2SPP hampir serentak dilakukan di 4 provinsi. Agenda kegiatan satu-per satu diuraikan sebagai berikut:

- a. Seleksi aktif calon konsultan dilakukan untuk mengatasi kekosongan yang masih terjadi. Adapun seleksi aktif yang dihadiri oleh KM-Nasional berlokasi di provinsi NAD, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Seleksi ini ditujukan untuk menjaring calon spesialis, P-UPK, maupun FK/FT.
- b. Dalam rangka memberikan pendidikan kepada masyarakat, unit IEC dan Prasarana akan menerbitkan poster prasarana. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian kepada masyarakat apakah poster tersebut mudah difahami dan efektif untuk mencapai tujuan. Sampel lokasi pengujian di provinsi Jawa Timur dan NTT. Di samping kegiatan pengujian, dilakukan supervisi terhadap pelaksanaan PNPM-PPK.



- c. Hingga Agustus 2007, workshop untuk sosialisasi PNPM masih dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah. KM-Nasional diundang menjadi narasumber pada acara tersebut. Sedangkan di provinsi NTT, PNPM-PPK diresmikan langsung oleh Menko Kesra. Dalam hal ini, KM-Nasional diwakili oleh IEC turut membantu mempersiapkan kegiatan.
- d. Salah satu proyek percontohan dalam PPK, yaitu P2SPP diperluas lokasi implementasinya. Sosialisasi dan TOT Setrawan di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Selatan langsung difasilitasi oleh KM-Nasional.
- e. Seperti diuraikan di atas, IST yang mulai diselenggarakan pada Agustus 2007 perlu dipantau oleh KM-Nasional. Adapun lokasi pantauan adalah: Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat.
- f. Berkaitan dengan program-program yang akan diterapkan di Kep. Nias (Sumatera Utara), maka pelatihan konsultan (terutama FT) tengah dipersiapkan. KM-Nasional bersama dengan KM-Provinsi menyusun modul untuk pelatihan tersebut.
- g. Belum adanya posisi MIS di provinsi baru yaitu Bangka Belitung dan Bengkulu, menjadi perhatian MIS KM-Nasional untuk melakukan OJT pelaporan terhadap operator komputer provinsi.
- h. Supervisi pelaksanaan RKTL provinsi NAD masih dilakukan untuk memastikan RKTL yang telah disusun bersama seluruh KM-Provinsi NAD dapat direalisasikan dengan baik.



## II. KEMAJUAN DAN HASIL

Perkembangan kegiatan PPK II masih relatif stagnan, sehingga dilaporkan dengan status yang sama dengan bulan sebelumnya. Adapun kegiatan PPK III dan PNPM-PPK menampakkan perkembangan walaupun tidak cukup signifikan termasuk pada progres pencairan dana. Begitu pula dengan laporan perkembangan pinjaman yang belum tuntas dilaporkan akibat kekurangan personil terkait.

Kegiatan PPK III t.a. 2006 telah menuntaskan pencairan dana sejak Desember 2006. akan tetapi hingga September 2007, masih terdapat 24 kecamatan Siklus VIII dan 16 kecamatan Siklus IX belum menuntaskan MDST di seluruh lokasi. Dengan demikian, KM-Nasional perlu terus mendorong Korprov untuk segera menuntaskan kegiatan melalui langkah-langkah yang direkomendasikan sebagaimana untuk penyelesaian PPK II. Sedangkan Siklus VII (t.a. 2005) telah menyelesaikan seluruh kegiatan. Untuk kegiatan PNPM-PPK 2007 MAD II telah dilakukan di 1.182 kec. atau 64%, MAD III telah dituntaskan di 780 (40%) kecamatan dari 1.719 kecamatan partisipasi, dan telah terjadi pencairan dana di 212 kecamatan.

### II.1. STATUS PENCAIRAN DANA PER SEPTEMBER 2007

Dalam rangka melakukan memantau terhadap pencairan dana PPK, maka unit Keuangan dan Anggaran melakukan kegiatan rutin yang berfokus pada verifikasi dan validasi data-data SP2D dan rekening BI maupun BRI, menyusun serta memantau progres pencairan dana BLM dan TA, verifikasi RPD dari provinsi, dan input data dokumen SP2D ataupun rekening BI.

Adapun pencairan dana BLM yang bersumber dari dana cost sharing untuk kegiatan PNPM-PPK 2007 sebesar Rp47,70 miliar yang telah dilakukan oleh 212 kecamatan. Sedangkan dana APBN telah dicairkan di 23 kecamatan dengan total dana sebesar Rp5,85 miliar. Sementara itu, rekapitulasi status pencairan dana BLM PPK II dan PPK III (dalam rupiah) tampak pada Tabel 1. - Tabel 3.

Tabel 1. Status Pencairan Dana BLM PPK II dan III

Keterangan	PPK II			PPK III/a		PPK III/b	
	Siklus IV	Siklus V	Siklus VI	Siklus VII	Siklus VIII	Siklus IX	Siklus X
Jumlah Kecamatan	1.264	964	868	592	592	557	
Alokasi Dana (miliar Rp)	1.051,000	790,725	685,500	470,250	453,500*	439,250**	291,400***
Pencairan Dana (miliar Rp)	1.041,119	772,997	633,713	466,483	450,772	435,175	13,270
Persentase (%)	99,1	97,7	92,5	99,2	99,40	99,07	4,55

Ket: \*) Alokasi awal Rp470,25 miliar, nilai ini berubah karena alokasi untuk daerah bencana dipisahkan.

\*\*) Alokasi awal Rp455,75 miliar, nilai ini berubah karena alokasi untuk daerah bencana dipisahkan.

\*\*\*) Pengesahan DIPA untuk Alokasi Siklus X masih dalam proses di Dep. Keuangan.

Tabel 2. Rincian Status Pencairan Dana BLM PPK II



DIPP	Jumlah Kec.	Alokasi DIPP (Rp)	Pencairan (Rp)	%
PPK II Th1 (2002/2003) FG	1.115	955.750.000.000	952.942.238.377	99,7%
MG	149	95.250.000.000	88.176.477.237	92,6%
Subtotal	1.264	1.051.000.000.000	1.041.118.715.614	99,1%
PPK II Th2 (2004) FG	824	700.050.000.000	699.221.836.523	99,9%
MG	140	90.675.000.000	73.775.000.000	81,4%
Subtotal	964	790.725.000.000	772.996.836.523	97,7%
PPK II Th3	724	594.250.000.000	562.088.123.887	94,6%
MG	144	91.250.000.000	71.625.000.000	78,5%
Subtotal	868	685.500.000.000	633.713.123.887	92,4%
TOTAL		2.527.225.000.000	2.447.828.676.024	96,9%

Tabel 3. Rincian Status Pencairan Dana BLM PPK III

DIPA	JML KEC	ALOKASI DIPA (Rp)	Pencairan (Rp)	Prosen-tase
PPK III/a Siklus VII	592	354.025.000.000	351.884.997.891	99%
PPK III/ a Siklus VII (Cost Sharing)	592	116.225.000.000	114.597.897.230	99%
TOTAL	592	470.250.000.000	466.482.895.121	99%
PPK III/a Siklus VIII	573	342.325.000.000	341.199.999.369	99,67%
PPK III/a Siklus VIII (Cost Sharing)	573	111.175.000.000	109.572.273.174	98,56%
TOTAL	573	453.500.000.000	450.772.272.543	99,40%
PPK III/b Sikus IX	537	316.875.000.000	314.699.993.783	99,13%
PPK III/b Siklus IX (Cost Sharing)	537	122.375.000.000	120.474.999.492	98,13%
TOTAL	537	439.250.000.000	435.174.993.275	99,07%
PPK III/b Sikus X	473	74.900.000.000*	6.150.000.000	0,08%
PPK III/b Siklus X (Cost Sharing)	473	216.500.000.000*	0	0,00%
TOTAL	473	291.400.000.000*	6.150.000.000	0,02%

Ket: \*) Alokasi DIPA Siklus X, belum disahkan karena masih dalam proses di Dep. Keuangan

Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebagai bagian dari pantauan unit, hingga akhir September 2007 tercatat DOK Perencanaan rata-rata telah dilakukan pencairan tahap II sebesar Rp36,04 miliar (41%) dari total Rp88,11 miliar. Terdapat 2 provinsi, yaitu NAD dan Papua yang belum mencairkan DOK Perencanaan. Sedangkan DOK Pelatihan Masyarakat baru tercairkan sebanyak Rp1,49 miliar atau 4% dari alokasi sebesar Rp39,75 miliar. Provinsi yang sudah mencairkan DOK Pelatihan Masyarakat adalah provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan NTT. Di sisi lain, DOK Pelatihan UPK Microfinance sebesar Rp6,91 miliar belum dicairkan sama sekali. Diperkirakan kegiatan Pelatihan ini akan dimulai pada November 2007.

## II.2. PERKEMBANGAN KEGIATAN PPK II

Status perkembangan kegiatan PPK II masih relatif stagnan, yaitu masih tersisnya kegiatan di Siklus IV. Upaya penyelesaian terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. KM-Nasional merekomendasikan untuk membuat langkah-langkah penyelesaian melalui MD Khusus.

Tabel 4 - 6 menampilkan status MDST pada kegiatan PPK II (Siklus IV - VI). Untuk kegiatan Siklus IV, 1 desa di prov. Papua, dinyatakan selesai dan tidak dapat dilakukan MDST ataupun MD Khusus karena terkait masalah penyalahgunaan dana. Sedangkan untuk Siklus V dan VI, seluruh lokasi telah berhasil melaksanakan MDST. Walaupun demikian, banyaknya kendala yang dihadapi, terutama masalah pencairan dana



Matching Grant yang harus disediakan oleh Pemda setempat, menyebabkan pelaksanaan Kegiatan Siklus VI cukup terlambat dan 22% kecamatan tidak dapat berpartisipasi pada seluruh tahapan kegiatan.

Tabel 4. Kecamatan Siklus IV Belum/Tidak Selesai

PROVINSI	Jml Kec.	Keterangan
N. ACEH DARUSSALAM	18	2 kec. pending: kec. Indrapuri, kab. Aceh Besar, kec. P. Banyak, kab. Aceh Singkil; 16 kec. bencana
RIAU	1	Pending: kec. Tapungkiri, kab. Kampar
JAWA TIMUR	1	Pending: kec. Udanawu, kab. Blitar
KALIMANTAN TENGAH	1	Belum MDST: kec. Sanaman Mantikei, kab. Katingan (1 desa)
SULAWESI SELATAN	1	Pending: kec. Mambie, kab. Polewali Mamasa
PAPUA	4	3 kec. pending: kec. Agisiga, Haju, Assue; Ada masalah: Waropen Bawah, kab. Waropen (1 desa)
IRIAN JAYA BARAT	8	8 kec. pending: kec. Beraur, Moraid, Sausapor, Seget, Samate, Waigeo Selatan, Waigeo Utara, Buruway;
Total	34	16 kec. pending, 1 desa di 1 kec. belum MDST, 16 kec. bencana

Tabel 5. Kecamatan Siklus V Belum/Tidak Selesai

PROVINSI	Jml Kec.	Keterangan
N. ACEH DARUSSALAM	82	Revisi Pola: PPK Rehabilitasi dari total 87 kecamatan
SUMATERA UTARA	6	6 kec. di Kep. Nias revisi Pola : PPK Rehabilitasi
BANTEN	1	Pending: Warunggunung;
JAWA TIMUR	1	Pending: Gandusari, kab. Blitar
NUSA TENGGARA TIMUR	2	Pending: Pala dan Wewewa Selatan, kab. Sumba Barat
SULAWESI SELATAN	3	Pending: Seko dan Rampi, kab. Luwu Utara; Mambie, kab. Polewali Mamasa
SULAWESI TENGGARA	2	Belum MDST (per Jan 2007 sudah cair 100%): kec. Uluiwoi dan Soropia; tetapi telah dilakukan MD Khusus
MALUKU UTARA	1	Pending: Sahu, kab. Halmahera Barat
Total	88	88 kec. PPK Rehab, 8 kec. pending, 2 kec. MD Khusus

Tabel 6. Kecamatan Siklus VI Belum/Tidak Selesai

PROVINSI	JML KEC.	KETERANGAN
N. ACEH DARUSSALAM	86	Revisi: PPK Rehabilitasi
SUMATERA UTARA	4	Revisi: 4 kec. PPK Rehabilitasi di Kep. Nias
RIAU	2	2 kec. Pending: Pasir Penyu, Lirik; kab. Indragiri hulu
SUMATERA SELATAN	1	kec. Muara Dua Kisam (3 desa): telah MD Khusus
BANTEN	3	3 kec. Pending: Pamarayan (kab. Serang), Saketi (kab. Pandeglang), Wr. Gunung (kab. Lebak)
JAWA TENGAH	2	Pending: Tersono, Reban (kab. Batang)
JAWA TIMUR	4	Pending: Gandusari (Blitar), Pasrujambe, Padang (kab. Lumajang), Tambelangan (kab. Sampang)
NUSA TENGGARA TIMUR	3	2 kec. Pending: Pala dan Wewewa Selatan, kab. Sumba Barat



PROVINSI	JML KEC.	KETERANGAN
GORONTALO	1	1 kec (Suwawa) dibatalkan;
SULAWESI TENGAH	1	1 kec. Pending: Paleleh
SULAWESI SELATAN	2	2 kec. Pending: Seko, Rampi (kab. Luwu Utara)
SULAWESI TENGGARA	5	2 kec. belum cair sama sekali, 2 kec. cair 80%, 1 kec. cair 100%; telah MD Khusus
SULAWESI BARAT	1	Pending: Mambie (kab. Polmas)
MALUKU UTARA	3	3 kec. Matching Grant: Tidak Terdanai APBD: Sahu (kab. Halmahera Barat), Oba Utara, Oba Selatan (kab. Kota Tidore Kepulauan)
PAPUA	52	78 kec. PPK Pola Khusus (PPD)
IRIAN JAYA BARAT	26	
Total MD Khusus	6	6 kec.: MD Khusus; Kec. belum MDST: -
Total Pending	21	Tersebar di 9 provinsi
Total PPK Pola Khusus	168	Tersebar di 4 provinsi

## REKAPITULASI KEGIATAN & ALOKASI DANA PPK II

Dengan dimulainya penyusunan laporan akhir untuk kegiatan PPK II, laporan kegiatan PPK II akan segera "tutup buku". Direncanakan pada bulan depan, kegiatan PPK II akan dilaporkan lebih singkat dan tidak akan dilaporkan jika laporan akhir telah dicetak.

Tabel 7. Kegiatan & Alokasi Dana PPK II

Jenis Kegiatan	Siklus IV		Siklus V		Siklus VI		Total JK	% Total JK	Total Rp (miliar)	% Total Rp
	JK	Rp (miliar)	JK	Rp (miliar)	JK	Rp (miliar)				
Prasarana/ Sarana	12.020	774,78	8.108	534,693	5.963	386,079	26.091	46%	1.695,552	74%
UEP	3.650	101,67	1.801	61,113	1.322	44,849	6.773	12%	207,632	9%
Pendidikan	1.780	59,95	1.366	57,901	1.416	64,031	4.562	8%	181,882	8%
Kesehatan	794	20,75	496	16,989	390	16,279	1.680	3%	54,018	2%
SPP	8.039	65,34	5.392	46,823	4.352	37,739	17.783	31%	149,902	7%
<b>Total</b>	<b>26.283</b>	<b>1.022,49</b>	<b>17.163</b>	<b>711,519</b>	<b>13.443</b>	<b>548,977</b>	<b>56.889</b>	<b>100%</b>	<b>2.282,986</b>	<b>100%</b>

Keterangan: JK= Jumlah Kegiatan; Rp= Besarnya dana yang terserap dalam miliar rupiah.

Tabel 7. di atas menampilkan rekapitulasi hasil kegiatan, dimana rekapitulasi ini tidak mengalami perubahan lagi. Akibatnya komposisi kegiatan dan alokasi dana yang telah digunakan oleh masyarakat tidak mengalami perubahan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari total dana PPK yang digunakan, yaitu sebanyak Rp2,283 trilyun, telah berhasil dilaksanakan sejumlah 56.889 kegiatan dimana 74% dari dana BLM dan 46% dari jumlah kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana sarana (P/S). Masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan P/S di desa menyebabkan kegiatan P/S menjadi usulan yang dominan.

### Pemetaan Hasil Kegiatan Prasarana/Sarana

Kegiatan P/S cukup mendominasi pada PPK II dan menghasilkan sekitar 16.900 km jalan dan tak kurang dari 100 km jembatan dengan total 26.091 kegiatan. Untuk melihat kondisi prasarana yang dibangun PPK dan upaya pemeliharannya, dilakukan pemetaan dengan data per Desember 2006. Hasil pemetaan yang ditampilkan berikut (Tabel 8) merupakan rangkuman yang berhasil disusun pada April 2007.



Tabel 8. Hasil Pemetaan Kegiatan Prasarana/Sarana PPK II

Siklus	Banyaknya Prasarana yang dibangun	Indikator													
		Fungsi Prasarana (%)			Kondisi Tim (%)			Upaya Pemeliharaan (%)			Kualitas Prasarana (%)				
Kategori Indikator		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5
IV	12.020	90	9	1	34	58	7	28	64	7	27	48	17	5	3
V	8.038	92	7	1	34	61	5	30	63	6	32	47	16	4	2
VI	5.880	91	8	1	41	55	4	34	61	5	34	48	13	4	2

Keterangan Indikator:

- a. Fungsi Prasarana : 1 = Berfungsi Seluruhnya; 2 = Berfungsi Sebagian; 3 = Tidak berfungsi  
 b. Kondisi Tim : 1 = Tim Aktif; 2 = Tim non aktif; 3 = Tim tidak aktif  
 c. Upaya Pemeliharaan : 1 = Dipelihara terus; 2 = Kadang-kadang; 3 = Tidak pernah  
 d. Kualitas Prasarana : 1 = Sangat baik; 2 = Baik; 3 = Sedang; 4 = Kurang; 5 = Buruk

Tabel 8. di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari fungsinya, rata-rata 90% hasil kegiatan berfungsi dengan baik dan 61%-64% diantaranya masih dipelihara oleh sekitar 36% tim pemelihara yang aktif. Sedangkan dari sisi kualitas, hasil kerja masyarakat memberikan mutu 75-82 persen. Masih rendahnya keaktifan tim pemelihara dan upaya pemeliharaan perlu menjadi perhatian agar hasil kegiatan program selanjutnya dapat lebih terpelihara.

#### Hasil Kegiatan Non-Prasarana/Sarana

Pengembangan kegiatan Pendidikan dan Kesehatan menjadi perhatian program. Berkenaan dengan itu, KM-Nasional berupaya untuk menyusun instrumen supervisi dan monitoring yang efektif. Panduan kegiatan tersebut, akan mengupas antara lain mengenai: (a) Sikap supervisor, (b) Dasar supervisi, (c) Peningkatan kapasitas konsultan (pembimbingan, IST/OJT, metode peningkatan ketrampilan), (d) Pertemuan efektif dan (e) Instrumen-instrumen yang diperlukan.

Kegiatan non-P/S tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kegiatan ini mengambil porsi 54% yang tersebar di tiga jenis kegiatan yaitu: ekonomi yang terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam khusus untuk Perempuan (SPP), pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan pendidikan dan kesehatan terbagi pula dalam sub-kegiatan. Rincian kegiatan non-P/S ditunjukkan Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan pada PPK II

UEP		PENDIDIKAN		KESEHATAN	
KEGIATAN	JK	KEGIATAN	JK	KEGIATAN	JK
UEP-	3.378	Bangun Gedung Sekolah	989	Bangun Gedung Kesehatan	216
Peternakan	130	Rehab Gedung Sekolah	1.073	Rehab Gedung Kesehatan	48
Perikanan	57	Bea Siswa	1.162	Pos Yandu	918
Perkebunan	10	Lain-Lain	1.338	Lain-Lain	498
Pertanian	73				
Industri Kecil	53				
Dagang	270				
Lain-Lain	2.802	<b>Total Pendidikan</b>	<b>4.562</b>	<b>Total Kesehatan</b>	<b>1.680</b>
<b>Total UEP</b>	<b>6.773</b>	<b>Total SPP</b>	<b>17.783</b>		



Pengembangan kegiatan Pendidikan dan Kesehatan menjadi perhatian program. Berkenaan dengan itu, KM-Nasional berupaya untuk menyusun instrumen supervisi dan monitoring yang efektif. Panduan kegiatan tersebut, akan mengupas antara lain mengenai: (a) Sikap supervisor, (b) Dasar supervisi, (c) Peningkatan kapasitas konsultan (pembimbingan, IST/OJT, metode peningkatan ketrampilan), (d) Pertemuan efektif dan (e) Instrumen-instrumen yang diperlukan.

### II.3. PERKEMBANGAN KEGIATAN PPK III

Perubahan kebijakan, bencana alam, dan kendala-kendala lain mengakibatkan kecamatan yang telah ditetapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan PPK tidak seluruhnya dapat melalui tahapan kegiatan yang ada. Begitupun dengan kegiatan PPK III. Kegiatan ini terbagi menjadi dua slice, yaitu PPK III/a dan PPK III/b yang masing-masing terbagi menjadi dua siklus dan biasa disebut Siklus VII - VIII untuk PPK III/a serta Siklus IX - X untuk PPK III/b. Kegiatan Siklus VII telah dimulai sejak semester II tahun 2005 dan menggunakan dana t.a. 2005. Sedangkan Siklus VIII dan IX menggunakan dana t.a. 2006, dan Siklus X didanai dari DIPA t.a. 2007. Perkembangan kegiatan setiap siklus diuraikan pada bagian selanjutnya. Saat ini 3 siklus kegiatan dalam tahap MDST. Sedangkan siklus terakhir (Siklus X) mengalami perluasan lokasi dengan sebutan PNPM-PPK 2007 dengan jumlah lokasi sebanyak 1.993 kecamatan, dalam tahapan kegiatan yang bervariasi. Untuk lokasi Siklus X, 53 kecamatan telah melakukan pencairan dana cost sharing.

Adapun perincian jumlah lokasi PPK III adalah:

- a. Siklus VII (592 kecamatan) berkurang satu kecamatan, yaitu Bokat (kab. Buol, Sulawesi Tengah); Lokasi PPD di Papua dan Papua Barat sebanyak masing-masing 6 distrik dilaporkan terpisah. Sehingga jumlah kecamatan pantauan sebanyak 579.
- b. Siklus VIII (592 kecamatan) berkurang 22 kecamatan yang terdiri dari: DIY (15 kecamatan bencana), Kalimantan Selatan (3 kecamatan di kab. Kotabaru mengundurkan diri), Sulawesi Tengah (1 kecamatan pending) dan Papua (3 distrik: Mappi, Asmat, Kota Jayapura tidak mendapat dana cost sharing) tetap dilaporkan terpisah. Ralat bulan lalu: saat ini perhitungan tahapan pada SIP untuk 4 kecamatan di provinsi NTT digabungkan dengan Siklus VIII;
- c. Siklus IX (557 kecamatan) berkurang 19 kecamatan yang terdiri dari: DIY (6 kecamatan), Jawa Tengah (5 kecamatan di kab. Klaten) dan NTT (4 kecamatan, sudah termasuk dalam Siklus VIII) merupakan lokasi bencana. Sedangkan Maluku Utara (3 kecamatan di kab. Kep. Sula) dan Lampung (1 kecamatan di kab. Lampung Barat) tidak mendapat alokasi dana cost sharing.

### SIKLUS VII dan VIII

Sejak bulan lalu, seluruh lokasi Siklus VII telah menuntaskan kegiatan. Artinya telah dilakukan MDST di 100% desa terdani dengan total kecamatan sebanyak 579 kecamatan. Beberapa lokasi Siklus VII yang terkendala berbagai hal diuraikan Tabel 10.

Tabel 10. Kecamatan Siklus VII: Tidak Melanjutkan Kegiatan

PROVINSI	JML KEC.	KETERANGAN
DI YOGYAKARTA	5	Kec: Samigaluh, Tepus, Rongkop, Wonosari, dan Girisubo; Pola Khusus: Rehabilitasi Pasca Bencan
SULAWESI TENGAH	1	Pending, kec. Bokat
PAPUA	6	12 kec. PPK Pola Khusus (PPD) +
IRIAN JAYA BARAT	6	5 kec. Pola Rehabilitasi Pasca Bencana
Total	19	- kec. Belum MDST, 1 kec. pending



Adapun kegiatan Siklus VIII yang terdiri dari 570 kecamatan masih menyisakan 30 desa yang tersebar di 23 kecamatan belum MDST. Lokasi/kecamatan belum MDST maupun terkendala ditampilkan Tabel 11 . Diharapkan sebelum Desember 2007, seluruh lokasi yang belum MDST tersebut dapat menyelesaikan kegiatannya.

Tabel 11. Kecamatan Siklus VIII Belum MDST

PROVINSI	JML KEC.	KETERANGAN
SUMATERA UTARA	2	Kec. Batang Natal dan Palipi
SUMATERA BARAT	2	Kec. Koto PGD, Lubuk Sikaping
LAMPUNG	1	Kec. Sungkai Selatan
DI YOGYAKARTA	15	Pola Khusus: Rehabilitasi Pasca Bencana
NUSA TENGGARA TIMUR	14	Tersebar di 9 kabupaten
KALIMANTAN SELATAN	3	Tidak dialokasikan dana CS
SULAWESI UTARA	2	Kec. Amorang, Dimembe
SULAWESI TENGAH	1	Pending, kec. Bokat
MALUKU UTARA	2	Kec. Weda, Bacan Timur
PAPUA	6	9 kec. PPK Pola Khusus (PPD) + 6 kec. tidak ada dana CS
IRIAN JAYA BARAT	6	15 kec. Pola RPB (DIY)
Total	60	23 kec. Belum MDST, 1 kec. pending

## REKAPITULASI KEGIATAN & ALOKASI DANA PPK III/A

Seperti dijelaskan pada laporan bulan lalu, sejak Mei-Juni 2007, rekapitulasi kegiatan PPK III/a tidak mengalami perubahan dikarenakan telah terdatanya seluruh kegiatan berdasarkan SPC yang diterbitkan. Rekapitulasi hasil kegiatan berdasarkan laporan akhir kegiatan di lapangan akan segera dipersiapkan untuk laporan akhir fase. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini, Team Leader KM-Nasional perlu mengingatkan kembali kepada Korprov untuk menyiapkan data akhir kegiatan Siklus VII dan VIII.

Namun demikian, penyiapan data akhir kegiatan dinilai belum dapat dilakukan akibat kesibukan agenda pelaksanaan PNPM-PPK 2007 yang waktunya tinggal beberapa minggu lagi. Alhasil, pada laporan bulan ini ditampilkan rekapitulasi yang tidak berbeda dengan bulan sebelumnya. Dengan menggunakan dana sebesar Rp870 miliar dan swadaya Rp109,178 miliar, telah berhasil dilaksanakan sejumlah 21.438 kegiatan (Tabel 12) dengan penerima manfaat total berjumlah lebih dari 13 juta orang dan 8 juta orang diantaranya adalah masyarakat kurang mampu.

Tabel 12. Kegiatan & Alokasi Dana PPK III/a

Jenis Kegiatan	Siklus VII		Siklus VIII		Total JK	% Jumlah Kegiatan	Total Rp (miliar)	% Rp
	Jumlah Kegiatan	Rp (miliar)	Jumlah Kegiatan	Rp (miliar)				
Prasarana/Sarana	5.095	328,91	5.402	315,468	10.497	49%	644,378	74%
UEP	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Pendidikan	800	45,31	904	53,609	1.704	8%	98,919	11%
Kesehatan	389	17,43	389	18,153	778	4%	35,583	4%
SPP	4.431	41,22	4.028	49,496	8.459	39%	90,716	11%
<b>Total</b>	<b>10.715</b>	<b>432,87</b>	<b>10.723</b>	<b>436,726</b>	<b>21.438</b>	<b>100%</b>	<b>869,596</b>	<b>100%</b>

Keterangan: JK= Jumlah Kegiatan; Rp= Besarnya dana yang terserap dalam miliar rupiah.

Pada kegiatan PPK III, tidak dialokasikan kegiatan UEP mengingat pengalaman PPK II yang kurang berhasil karena rendahnya tingkat pengembalian pinjaman. Seperti tampak



pada Tabel di atas, kegiatan masih didominasi oleh usulan pembangunan P/S dan disusul oleh kegiatan SPP. Pembangunan P/S telah menghasilkan lebih dari 5 km jalan dan 18 km jembatan. Sedangkan kegiatan SPP telah dirasakan manfaatnya oleh 156 ribu orang perempuan dan 16 ribu orang laki-laki. Di sisi lain, kegiatan pendidikan dan kesehatan dapat membantu masing-masing 300 ribu dan 400 ribu masyarakat kurang mampu.

## SIKLUS IX

Seperti halnya Siklus VIII, Hingga September 2007 kegiatan Siklus IX masih dalam tahap penyelesaian MDST. Dari 557 kecamatan lokasi Siklus IX, 496 kecamatan melanjutkan kegiatan secara normal dan sisanya dengan pola khusus (diluar kecamatan yang tidak tersedia dana cost sharing). Akan tetapi, 2 kecamatan di Kota Ternate tidak dapat mencairkan dana APBN (30% atau Rp525 juta) karena terlambat mencairkan dana cost sharing sebesar 70% dari BLM. Walaupun dana yang tersedia hanya 70%, pada bulan Agustus 2007 masyarakat berhasil menyelesaikan kegiatan di 2 kecamatan tersebut (Kota Ternate Utara dan Pulau Ternate). Adapun banyaknya desa yang belum menuntaskan MDST sebanyak 22 desa yang tersebar di 16 kecamatan (Tabel 13). Pada bulan lalu, tercatat 15 kecamatan belum MDST. Hal ini terjadi kekeliruan karena 3 kecamatan di provinsi Maluku belum terdaftar dalam Tabel.

Tabel 13. Kecamatan Siklus IX Belum MDST

PROVINSI	JML KEC.	KETERANGAN
SUMATERA UTARA	7	Kec. Siabu, Muara Sipongi, Porsea, Maduamas, Kolang, Parlilitan, Nainggolan, Pangururan
RIAU	1	Kec. Tambusai
LAMPUNG	1	Kec. Balik Bukit: tidak dialokasikan dana CS
JAWA TENGAH	5	Kab. Klaten, dialihkan menjadi lokasi bencana
DI YOGYAKARTA	6	Seluruh kecamatan dialihkan menjadi lokasi bencana
NUSA TENGGARA TIMUR	2	Kec. Golewa, Aesesa
KALIMANTAN TENGAH	1	Kec. Delang
GORONTALO	2	Kec. Paguyaman, Wonosari
SULAWESI TENGAH	1	Kec. Batui
MALUKU UTARA	3	3 kec. di Kep. Sula tidak dialokasikan dana CS
MALUKU	3	Kec. PP Terselatan, Leksula, Kepala Madan
PAPUA	35	42 kec. PPK Pola Khusus (PPD) + 4 kec. tidak ada dana CS
IRIAN JAYA BARAT	7	11 kec. Pola RPB (DIY dan Klaten)
	Total	16 kec. Belum MDST

## PNPM-PPK 2007

Setelah melalui berbagai re-evaluasi dan tinjauan, akhirnya dikeluarkan surat Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri tertanggal 3 April 2007 mengenai Alokasi PNPM Tahun 2007. Dalam surat tersebut ditetapkan 1.993 kecamatan sebagai lokasi PNPM-Perdesaan dan 834 kecamatan untuk PNPM-Perkotaan serta di 348 kecamatan (21 kecamatan diantaranya termasuk lokasi PNPM-Perdesaan) akan diterapkan Program Keluarga Harapan. Penetapan tersebut ditegaskan oleh Tim Pengendali PNPM melalui surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM, tertanggal 12 April 2007 mengenai Lokasi Kegiatan PNPM 2007. Daftar lokasi dan alokasi merupakan hasil penetapan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tim Pengendali PNPM tanggal 26 Februari 2007.

Tidak seluruh lokasi yang telah ditetapkan tersebut siap untuk menerima program, terutama dalam hal penyediaan dana cost sharing. Akibat perubahan lokasi dan alokasi,



pemerintah daerah perlu melakukan penganggaran ulang, dimana tidak seluruh lokasi dapat merubah anggaran dengan mulus. Hal ini dibuktikan dengan ketidaksiapan pemerintah daerah sehingga berakibat pada batalnya 22 kecamatan (bulan lalu 27 kecamatan) untuk berpartisipasi dalam PNPM-PPK 2007 (Tabel 14).

Tabel 14. Kategori Lokasi PNPM-PPK 2007

No.	Kategori	Jumlah Kecamatan	Batal (kecamatan)
1.	Eks PPK (Lokasi yang pernah mendapat dana PPK)	643	7
2.	Rehab-Rekons (Lokasi bencana dan mendapat dana PPK untuk Rehabilitasi-Rekonstruksi)	148	-
3.	Siklus X (Lokasi Siklus X atau PPK III/b tahun II, dimana sedang menjalankan kegiatan ta. 2007)	473	-
4.	Baru (Lokasi yang tidak pernah mendapat dana PPK)	600	15
	Total 1	1.864	22
5.	PNPM Generasi sehat dan cerdas	96	-
6.	PNPM Generasi yang lokasinya overlap dengan Siklus X, sehingga dimasukkan dalam lokasi PNPM Generasi	33	-
	Total 2	129	-
	Grand Total(Total 1 + Total 2)	1.993	

Hingga akhir September 2007, perkembangan kegiatan di lokasi PNPM-PPK 2007 menampakkan kemajuan walaupun jika dibandingkan dengan target pencairan dana 100% pada Desember 2007 masih sangat berat. Cermati saja, bahwa saat ini, MAD II baru terlaksana di 1.182 kecamatan (69%) dan MAD III 45% atau telah terjadi di 780 kecamatan dari 1.719 kecamatan. Sedangkan pencairan dana APBD (cost sharing) dan APBN berhasil dilakukan masing-masing di 212 kecamatan dengan total dana yang dicairkan sebesar Rp47,70 miliar dan Rp5,85 miliar di 23 kecamatan.

#### II.4. PPK POLA KHUSUS

Kegiatan PPK yang dimulai sejak tahun 1998, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai perubahan kebijakan seiring dengan berbagai pengalaman ataupun situasi dan kondisi yang ditemui. Pada akhir 2004, tsunami telah menerjang wilayah NAD dan Kep. Nias. Dua tahun kemudian (27 Mei 2006) terjadi gempa di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah (terutama kab. Klaten). Kerusakan prasarana/sarana yang sangat berat menyebabkan diterapkannya PPK Rehab-Rekons di lokasi-lokasi tersebut. Bencana lain terjadi di beberapa lokasi PPK, namun tidak sampai mengubah pola pelaksanaan PPK.

Di samping bencana, karena kondisi geografis yang sangat sulitnya menyebabkan lambatnya perkembangan kegiatan di provinsi kepala burung. Alhasil, pengambil kebijakan menetapkan untuk diterapkannya PPK Pola Khusus di kedua provinsi tersebut. Laporan perkembangan kegiatan di setiap lokasi khusus disampaikan pada uraian selanjutnya.

Adapun gempa yang terjadi Sumatera Barat pada 6 Maret 2007 mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah dan bangunan prasarana dasar serta sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah (dalam hal ini Depdagri, Dirjen PMD) telah melakukan kajian sehingga memandang perlunya perlakuan khusus di lokasi terkait melalui penerapan PTO Khusus Rehabilitasi. Namun, pada bulan Agustus ini belum diperoleh perkembangan kegiatan sehingga belum dapat dilaporkan.



## PPK DI NAD & NIAS

Kegiatan PPK Rehab-Rekons di NAD dan Kep. Nias (Sumatera Utara) didanai dari hibah beberapa negara donor yang tergabung dalam MDTF (TF-055583-IND [70603301] dan TF-055628-IND [70604001]). Masing-masing lokasi tersebut mendapat alokasi sebesar Rp414,9 miliar dan Rp79 miliar untuk alokasi dana sosial dan alokasi umum (berupa perbaikan dan pembangunan prasarana-sarana). Kegiatan tahun 2007 ini difokuskan pada penyelesaian MDST.

Pelaksanaan PNPM-PPK di prov. NAD terkait kerjasama dengan BRR dan BRA. Pada Agustus 2007, KM-Nasional mendampingi Dir. KPM - Dirjen PMD dalam rapat kerja dengan BRR. Dalam rapat tersebut ditekankan bahwa implementasi PNPM-PPK harus *community-based*. Artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat dan bersifat *open menu*. Penekanan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi pembangunan.

Di Kep. Nias, pada akhir Februari 2007 BRR telah meluncurkan program tambahan yaitu R2PN yang akan diimplementasikan melalui kerjasama dengan PNPM-PPK. Pelaksanaan PPK-R2PN telah memasuki fase perencanaan. Semua pelaku di desa dipilih dan dilatih agar dapat mendukung keberhasilan proses pelaksanaan di lapangan. Dalam rangka mensosialisasikan program melalui media visual, maka dilakukan upaya pembuatan film berdurasi pendek bertema: (1) Musyawarah Antar Desa /MAD Sosialisasi; (2) Musyawarah Desa/MD Sosialisasi; dan (3) Penggalian gagasan. Direncanakan pengambilan gambar akan dilakukan di prov. Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada kemudahan akomodasi dan logistik. Selain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, film ini juga diharapkan dapat menjadi *tool* bagi fasilitator/konsultan di lapangan dalam melakukan sosialisasi program.

### PPK di Provinsi NAD

Luasnya cakupan kegiatan PPK Rehab-Rekons di provinsi NAD mendorong pelaku PPK terutama konsultan untuk bekerja lebih keras dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan. Hingga September 2007, akhirnya MDST maupun pembentukan Tim Pemelihara dapat terlaksana di 221 kecamatan (100%) dengan total desa terdani sebanyak 3.007 desa. Adapun besar dana yang terserap untuk melaksanakan kegiatan di 221 kecamatan ditampilkan Tabel 15. Pelaksanaan kegiatan PPK dengan Pola Khusus (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) di provinsi ini memakan waktu yang cukup panjang dengan berbagai kendala yang sangat kompleks.

Berdasarkan analisis Korprov, penyelesaian kegiatan di provinsi NAD yang selama ini dinilai relatif lambat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. kelangkaan material, terutama bahan kayu;
2. penyalahgunaan dana dan prosedur dalam penyerapan dana;
3. kurang maksimalnya tanggung jawab dan kesadaran konsultan dalam menjalankan program;
4. kurangnya komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan;
5. banyaknya revisi kegiatan yang berita acaranya tidak dikirimkan kepada provinsi, sehingga realisasi tidak sesuai dengan rencana.

Salah satu akibat timbulnya faktor-faktor di atas adalah karena banyaknya program lain dari berbagai donor yang mengimplementasikan kegiatan dalam rangka membantu rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD.



Tabel 15. Pencairan Dana di NAD

SUMBER DANA	ALOKASI (Rp)	PENCAIRAN (Rp)	PENYERAPAN
IBRD-4627-IND [10639501]	30.600.000.000	30.600.000.000	100%
IDA-3806-IND [10680201]	10.000.000.000	424.869.999.233	100%
TF-055583-IND [70603301]	335.500.000.000		100%
TF-055628-IND [70604001]	79.370.000.000		100%
<b>TOTAL</b>	<b>455.470.000.000</b>	<b>455.469.999.233</b>	<b>100%</b>

#### PPK di Kep. Nias

Perkembangan kegiatan terkini di Kep. Nias, belum dapat dilaporkan karena belum sampainya laporan dari lokasi terkait. Akibatnya laporan relatif tidak mengalami perubahan. Kegiatan PPK di Kep. Nias berkembang menjadi beberapa pola berdasarkan sumber dananya. Hingga saat ini, terdapat 3 pola pelaksanaan PPK di Kep. Nias, yaitu: PPK-RPB (Rehabilitasi Pasca Bencana), PPK-R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias/housing), dan PNPM-PPK 2007. Jumlah kecamatan yang mendapatkan dana serta alokasi setiap program diuraikan Tabel 16.

Tabel 16. Pola Pelaksanaan PPK di Kep. Nias

No.	Pola/Program	Jumlah Kec.	Alokasi Dana (miliar Rp)	Pencairan (%)	Kegiatan
1.	PPK - RPB	22	79,000	100	Open menu, sesuai dengan prosedur PPK
2.	PPK-R2PN	9	382,032	0	pembangunan perumahan, sekolah, dan gedung balai desa (given). Satu kegiatan lainnya bersifat open menu berupa prasarana pendukung perdesaan.
3.	PNPM - PPK 2007	13	10,500	0	Open menu, sesuai dengan prosedur PPK
	Total	-	471,532	-	

Pola penanganan PPK-RPB yang difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi dengan alokasi dana sebanyak Rp79 miliar, telah dicairkan 100%. Namun penyaluran dana ke masyarakat belum mencapai 100%. Dana yang telah tersalurkan ke desa di kab. Nias dan Nias Selatan hingga Agustus 2007 adalah sebesar Rp72,404 miliar atau 91,65% yang terdiri dari dana sosial Rp13,248 miliar (99,72%) dan dana alokasi umum sebesar Rp59,156 miliar (90,02%) seperti ditunjukkan Tabel 17. Dana sosial tidak dapat mencapai 100% karena terjadi kekeliruan pada penyerapan dana di kec. Tuhemberua yang berakibat sisa dana sebesar Rp1,78 juta tidak dapat diserap lagi.

Sedangkan PPK-R2PN (program yang mencakup 9 kecamatan dan dua kabupaten dengan total desa berpartisipasi sebanyak 113 desa), terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan, yaitu: pembangunan Perumahan, Sekolah, Balai Desa, dan Prasarana Pendukung Perdesaan. Alokasi dana yang dianggarkan masing-masing untuk kab. Nias dan Nias Selatan sejumlah Rp217,05 miliar dan Rp164,986 miliar atau total dana sebesar Rp382,032 miliar untuk tahun anggaran 2007 dan 2008. Perkembangan masing-masing kegiatan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah melakukan Musyawarah Desa Sosialisasi. Saat ini tengah memasuki tahapan Musyawarah Khusus Perempuan. Berdasarkan PTO Khusus



PPK-R2PN, tahapan kegiatan dipersingkat sehingga setelah dilakukan MAD II, pencairan dana dapat dilaksanakan.

Tabel 17. Penyaluran Dana dari UPK ke desa di Kep. Nias per Agustus 2007

SUMBER DANA	ALOKASI (Rp)	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
IBRD-4627-IND [10639501]	3.350.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	100,00%
TF-055583-IND [70603301]	72.500.000.000			
TF-055628-IND [70604001]	6.500.000.000			
Dana Sosial		13.284.855.400	13.247.912.750	99,72%
Dana Alokasi Umum	Kab. Nias	42.830.079.500	41.753.906.366	97,48%
	Kab. Nias Selatan	22.883.281.700	17.402.560.900	76,05%
	Total Kep. Nias	65.713.361.200	59.156.467.266	90,02%
<b>TOTAL</b>	<b>82.350.000.000</b>	<b>79.000.000.000</b>	<b>72.404.380.016</b>	<b>91,65%</b>

## PPK DI KLATEN & DI YOGYAKARTA

Pasca gempa, kab. Klaten (prov. Jawa Tengah) dan provinsi DI Yogyakarta mendapat dana untuk merehabilitasi infrastruktur di wilayah tersebut. Kab. Klaten mendapat alokasi Rp43,25 miliar untuk 24 kecamatan dan DI Yogyakarta memperoleh alokasi untuk seluruh kecamatan (51 kecamatan di 4 kabupaten) sebesar Rp82,75 miliar yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp81,25 miliar dan APBD sebanyak Rp1,5 miliar. Seluruh dana di kedua lokasi tersebut telah terserap 100% dengan rekapitulasi kegiatan ditunjukkan Tabel 18 dan 19.

### PPK di Klaten

Sejak Juli 2007, pelaksanaan PPK Rehabilitasi di kab. Klaten yang mendapat alokasi dana sebesar Rp43,25 miliar telah memasuki tahap penyelesaian kegiatan dan pada bulan ini seluruh kegiatan baik penyaluran dana, pelaksanaan fisik, maupun MDST telah 100% dituntaskan. Sejumlah 693 kegiatan prasarana fisik (jembatan, jalan, air bersih, irigasi, MCK, pasar, bendungan, gedung balai desa, talut, gorong-gorong, dll.) dan 111 gedung sekolah serta 12 gedung kesehatan telah berhasil dibangun. Di samping itu, sebanyak Rp10,126 miliar dari alokasi dana digunakan untuk kegiatan SPP. Jika dijumlahkan dengan modal awal (PPK I dan PPK II), maka dana pinjaman yang dikelola UPK di kab. Klaten sebesar Rp13,44 miliar. Tabel 18 menampilkan alokasi dana dan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 18. Jenis Kegiatan dan Alokasi Dana di kab. Klaten

No.	Jenis Kegiatan	Alokasi (Rp)
1.	Prasarana/Sarana	27.029.361.835
2.	Pendidikan	3.140.864.638
3.	Kesehatan	794.183.490
4.	Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)	10.126.263.801
5.	Operasional UPK (2%)	863.886.104
6.	Operasional TPK (3%)	1.295.440.132
	Total	43.250.000.000
	Swadaya Masyarakat	4.784.017.058



### PPK di DI Yogyakarta

Sama dengan Kep. Nias, laporan perkembangan kegiatan PPK dari DIY belum diterima sehingga laporan yang disampaikan berikut masih sama dengan bulan lalu. Perkembangan bulan lalu menunjukkan bahwa terdapat 3 desa (Jagalan, Trimurti, dan Sriharjo) kec. Srandakan, kab. Bantul dengan kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna, masih belum MDST karena kurangnya swadaya masyarakat. Namun, akhirnya 2 desa dapat melaksanakan MDST, sisanya desa Trimurti belum MDST dan dana masih tersisa di TPK sebesar Rp6,354 juta. Sejumlah dana terdiri dari dana kegiatan prasarana Rp3,5 juta dan dana operasional desa Rp2,854 juta. Sejak Desember 2006, pencairan dana BLM telah mencapai 100% dan pada Juli 2007, dana telah berhasil tersalurkan seluruhnya ke desa. Pencairan terakhir dilakukan di kec. Samigaluh (kab. Kulonprogo) sebesar Rp7.174.400. Tabel 19. menampilkan alokasi dana berdasarkan jenis kegiatan yang dipilih oleh masyarakat.

Tabel 19. Jenis Kegiatan dan Alokasi Dana di DIY

No.	Jenis Kegiatan	Alokasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Prasarana/Sarana	46.042.180.985	55,64
2.	Pendidikan	11.955.470.700	14,45
3.	Kesehatan	4.742.914.950	5,73
4.	Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)	15.890.295.100	19,20
5.	Operasional UPK (2%)	2.470.892.930	2,99
6.	Operasional UPK TPK (3%)	1.648.235.035	1,99
	Total	82.749.989.600	100,00

### PPD DI PAPUA & PAPUA BARAT

Kegiatan PNPM-PPD di provinsi Papua dan Papua Barat relatif baru dimulai. Di provinsi Papua, pada Agustus 2007 baru dilaksanakan pelatihan pratugas. Sedangkan di Papua Barat telah dilakukan pelatihan pada sebelumnya. Pada bulan ini berhasil dilakukan IST (pelatihan tambahan) bagi KM-Kabupaten. Namun, IST bagi FK/FT belum dapat dilaksanakan, bahkan KM-Kabupaten masih perlu bimbingan dalam mengidentifikasi kebutuhan training maupun menyusun agenda serta matriks kurikulum IST. Pelaksanaan IST dipantau langsung oleh KM-Nasional untuk memastikan IST dapat berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kegiatan PPD Siklus sebelumnya tetap dijalankan dan sebagian besar telah menyelesaikan kegiatan. Di provinsi Papua masih kegiatan Siklus VIII dan IX masih tersisa, sedangkan di provinsi Papua Barat telah berhasil dilakukan MKST di seluruh lokasi.

#### PPD di Provinsi Papua

Hingga akhir September 2007, perkembangan kegiatan Siklus VIII dan IX belum mengalami perubahan sejak dua bulan lalu. Kesibukan untuk memulai kegiatan PNPM-PPD cukup menyita perhatian Korprov sehingga kegiatan siklus sebelumnya kurang mendapat pengontrolan. Sedangkan kegiatan PPK II, terdapat satu distrik di lokasi Siklus IV (Waropen Atas) terhenti pada pencairan dana tahap II karena terjadi penyimpangan dana yang dilakukan oleh ketua UPK dan FK sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan. Adapun di Waropen Bawah, 1 kampung telah beberapa bulan mengalami stagnasi (belum MKST). Berdasarkan keterangan Korprov, lokasi tersebut masih terkait penyalahgunaan dana dan tidak ada penanganan lebih lanjut dari provinsi. Untuk kegiatan Siklus V dan VII seluruh lokasi telah menuntaskan kegiatan.



Tabel 20. Perkembangan kegiatan PPK di Papua

No.	Kegiatan	Alokasi Kecamatan	Kecamatan Aktif	Belum MKST	
				Distrik	Kampung
1.	Siklus IV	56	53	1; Waropen Bawah	1
2.	Siklus V	52	47	-	-
3.	Siklus VII	6	4	-	-
4.	Siklus VIII	6	3	1; Merauke Kota	7; dari 30
5.	Siklus IX	35	35	1; Sukikai	1; dari 277

Perkembangan kegiatan PNPM-PPD 2007 telah dimulai pada awal bulan Agustus 2007, dimana bulan sebelumnya dilakukan Prasosialisasi. Dari 83 distrik yang berpartisipasi, tahapan kegiatan yang telah dicapai pada September 2007 masih relatif terlambat. Sebanyak 23 distrik berhasil melakukan Pertemuan Tingkat Distrik (PTD) I, dan tahap selanjutnya belum dapat dicapai sama sekali. Kondisi ini sangat memprihatinkan, 60 distrik masih dalam tahap Prasosialisasi dan belum memulai PTD I. Mengingat batas pencairan dana tinggal beberapa minggu lagi, diharapkan kebijakan peluncuran DIPA dapat diterapkan kembali agar konsentrasi pelaku tidak terpaksa pada pencapaian tahapan kegiatan sehingga dapat mengabaikan prinsip maupun prosedur. Akibatnya kualitas hasil pelaksanaan program yang diharapkan tidak dapat tercapai.

#### PPD di Provinsi Papua Barat

Perkembangan kegiatan PNPM-PPK di provinsi ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan provinsi tetangga (Papua) karena prov. Papua Barat melakukan Pelatihan Pratusas lebih cepat sehingga fasilitator lebih cepat dimobilisasi. Kegiatan PNPM-PPK 2007, terdiri dari 7 lokasi Siklus X, 23 lokasi eks PPK, dan 5 distrik lokasi baru sehingga total 35 distrik. Hingga September 2007, perkembangan kegiatan cukup signifikan dibandingkan dengan bulan lalu: 32 distrik telah melakukan Pertemuan Tingkat Distrik (PTD) I, Musyawarah Kampung I telah terjadi di 25 distrik, Pelatihan KPMK (Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung) telah dilaksanakan di 11 distrik, PBM (Perencanaan Bersama Masyarakat) telah dilakukan oleh 10 distrik. Sedangkan PTD II (setara dengan MAD III) belum berhasil dilaksanakan.

Provinsi Papua Barat telah berpartisipasi dalam PPK sejak fase I dengan jumlah distrik partisipasi sebanyak 35 distrik. PPK II tahun I (Siklus IV) melibatkan 30 distrik, tetapi 8 distrik diantaranya tidak melanjutkan kegiatan karena tidak tersedia dana MG. Siklus selanjutnya (tahun II, yang pelaksanaannya bersamaan dengan tahun III di lokasi lain) diikuti oleh 26 distrik dan hanya 16 distrik yang melaksanakan kegiatan. Dari 16 distrik tersebut, 1 distrik (Warmare, Manokwari) belum menuntaskan MKST.

Sementara itu, kegiatan PPK III/a dan PPK III/b III terdiri dari 13 distrik (6 distrik PPK III/a dan 7 distrik PPK III/b), hanya 4 distrik di Siklus VII yang melanjutkan kegiatan. Sedangkan Siklus VIII dan IX, semua lokasi tersebut telah berhasil melakukan pencairan dana hingga 100% dan telah dilakukan MKST di seluruh lokasi tetapi tim pemelihara Siklus IX belum terbentuk di kab. Bintuni.

## II.5. PERKEMBANGAN UPK

Perkembangan UPK dipantau oleh unit Microfinance (MCFS) KM-Nasional. Namun pemantauan ini sering terhambat karena banyaknya tugas-tugas lain yang dibebankan, seperti: Penyusunan PTO, Narasumber Sosialisasi PNPM, Supervisi dan Monitoring P2SPP, dsb. Keadaan diperburuk karena personil MCFS berkurang satu orang akibat demobilisasi pada akhir Juli 2007 lalu.



Adapun rencana kegiatan unit ini adalah: Penyusunan panduan tambahan, modul dan bahan bacaan untuk pelatihan DOK Microfinance, Supervisi dan monitoring pelaksanaan pelatihan DOK Microfinance, Persiapan materi untuk rekrutmen FMS dan MCFS regional, penyusunan laporan perkembangan pinjaman serta pemetaan UPK dan uji petik hasil scoring pendampingan PUPK. Pada tahun anggaran 2007 ini, disediakan DOK khusus untuk meningkatkan kapasitas UPK yang potensial agar dapat berkembang lebih baik.

#### Perkembangan pinjaman UEP dan SPP

Laporan perkembangan pinjaman disusun setiap triwulan, dimana periode terakhir adalah Juli - September 2007. Pada bulan ini, sejatinya dapat dilaporkan perkembangan terkini, namun laporan dari lapangan belum lengkap dan sumberdaya di KM-Nasional sangat minim. Akibatnya laporan perkembangan pinjaman yang disampaikan masih berdasarkan Laporan Penggunaan Pinjaman (LPP) per Juni 2007 karena masih terkendala pada banyaknya penugasan di luar bidang sementara salah satu personil telah didemobilisasi. Dilaporkan bahwa dari target pengembalian pinjaman SPP sejumlah Rp614,235 miliar diperoleh realisasi pengembalian sebanyak Rp574,764 miliar atau sebesar 93,57%. Sedangkan pinjaman yang masih beredar di masyarakat sejumlah Rp324,603 miliar dengan jumlah tunggakan sebesar Rp39,382 miliar.

Sementara itu, target pengembalian pinjaman UEP secara nasional pada bulan Juni 2007 sebesar Rp1,2 trilyun dengan realisasi pengembalian sejumlah Rp1 trilyun (83,36%). Adapun pinjaman yang masih beredar di masyarakat sebanyak Rp441,083 miliar dengan jumlah tunggakan Rp199,352 miliar. Laporan perkembangan pinjaman UEP dan SPP lebih jelas digambarkan Tabel 21.

Tabel 21. Perkembangan Pinjaman per Juni 2007

Kegiatan	Target Pengembalian (miliar Rp)	Realisasi Pengembalian (miliar Rp)	Prosentase Pengembalian (%)	Saldo Pinjaman (miliar Rp)	Tunggakan Pinjaman (miliar Rp)
SPP	614,235	574,764	93,57	324,603	39,382
UEP	1.198,248	998,896	83,36	441,083	199,352
<b>Total</b>	<b>1.812,483</b>	<b>1.573,660</b>	<b>87,81</b>	<b>765,686</b>	<b>238,734</b>

#### Perkembangan pemetaan UPK

Sama halnya dengan laporan perkembangan pinjaman, maka pemetaan UPK yang dapat dilaporkan adalah status per Juni 2007. UPK dipetakan dengan kategori A, B, C, dan D. Dari 1.630 UPK di 28 provinsi (kecuali Papua dan Papua Barat), sejumlah UPK dikategorikan masing-masing A - D seperti tampak pada Tabel 22.

Tabel 22. Kategori UPK Berdasarkan Pemetaan per Juni 2007

Pemetaan	Kategori	Jumlah UPK	Keterangan	
			Nilai Pemetaan	Saldo Pinjaman di Masyarakat
Potensial: 1.262	A	882	>6	>Rp300 juta
	B	380	>6	≤Rp300 juta
Non-Potensial: 368	C	201	≤6	>Rp300 juta
	D	167	≤6	≤Rp300 juta



Jumlah UPK yang dipetakan mengalami penambahan dibandingkan pemetaan UPK per Maret 2007 yaitu sejumlah 7 UPK. Untuk kategori UPK potensial A juga mengalami penambahan dari 867 UPK menjadi 882 UPK. Demikian juga jumlah UPK potensial kategori B dari 867 UPK menjadi 882 UPK. Pemetaan UPK dilakukan di 28 provinsi, tidak termasuk Papua dan Papua Barat.

#### Masalah dan Rekomendasi

1. Sampai saat ini unit MIS belum dapat membantu penyajian data untuk Laporan Keuangan (laporan perkembangan pinjaman, laporan kolektibilitas, laporan Neraca dan Operasional) secara nasional dari basis data yang sudah tersedia. Akibatnya penyusunan laporan masih dilakukan secara manual berdasarkan hardcopy dari laporan bulanan Korprov. Untuk itu direkomendasikan agar unit MIS dapat mendukung data yang dibutuhkan karena data tersebut sangat bermanfaat dalam melakukan analisis perkembangan pinjaman dan keuangan di lapangan.
2. DOK UPK Microfinance belum difahami oleh pelaku di provinsi. Sebagian menganggap bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengajuan DOK sama dengan DOK Tambahan (Siklus VI) maupun DOK Perencanaan. Dengan demikian, perlu dibentuk tim penguatan KM-Nasional untuk memberikan pemahaman tersebut kepada Fasilitator Training Regional.

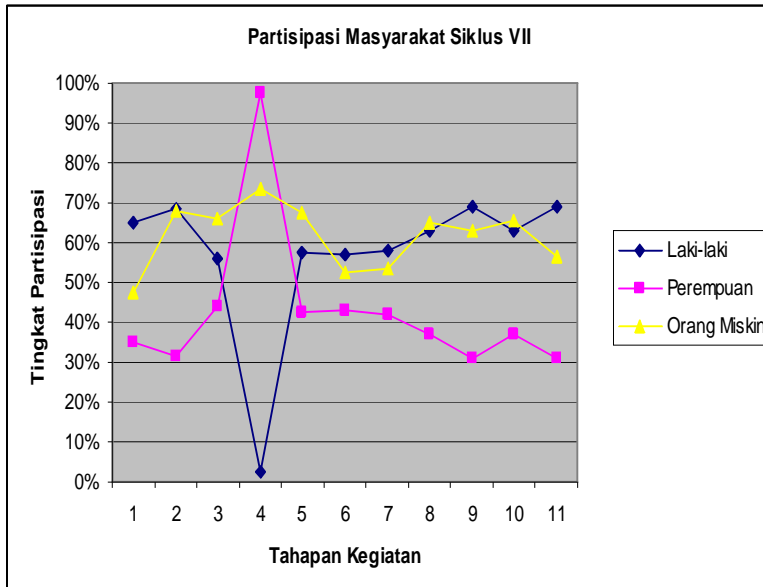
## II.6. PARTISIPASI MASYARAKAT

Salah satu tujuan khusus PPK adalah meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, fasilitator maupun konsultan terus mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan program di lapangan.

Tingkat partisipasi selama ini diukur dari kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan terutama musyawarah desa. Namun demikian, dari banyaknya jumlah swadaya masyarakat dalam menyumbang HOK dan material pendukung menunjukkan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Sebut saja pada kegiatan PPK II, sejumlah Rp2,283 triliun telah digunakan untuk mendanai 56.889 kegiatan dengan swadaya masyarakat senilai Rp346,162 miliar atau 15% dari biaya yang dikeluarkan program. Sedangkan kegiatan PPK III/a telah menyerap dana sebanyak Rp869,596 miliar untuk mendanai 21.438 kegiatan. Adapun swadaya masyarakat sebesar Rp110,41 miliar atau 13% dari alokasi dana.

Dari sisi kehadiran dalam setiap tahapan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat ditunjukkan Gambar 2-3. Sedangkan rata-rata partisipasi masyarakat pada Siklus VII - IX (dalam hal ini tanpa musyawarah khusus perempuan) ditampilkan Gambar 4. Rata-rata partisipasi kelompok laki-laki sebanyak 63%, perempuan 37%-46%, dan orang miskin 59%-60%. Tingkat partisipasi perempuan masih dinilai kurang jika dibandingkan kelompok laki-laki yang mencapai hampir dua kali lipat jumlah perempuan yang hadir dalam musyawarah desa. Untuk mendorong partisipasi perempuan, PPK menetapkan mekanisme pembelajaran musyawarah melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). MKP dapat pula dihadiri oleh kaum laki-laki sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan 2, sebanyak 2% dan 5% dari jumlah peserta yang hadir dalam MKP (tahapan ke-4) Siklus VII maupun VIII adalah kaum laki-laki.





Keterangan 1

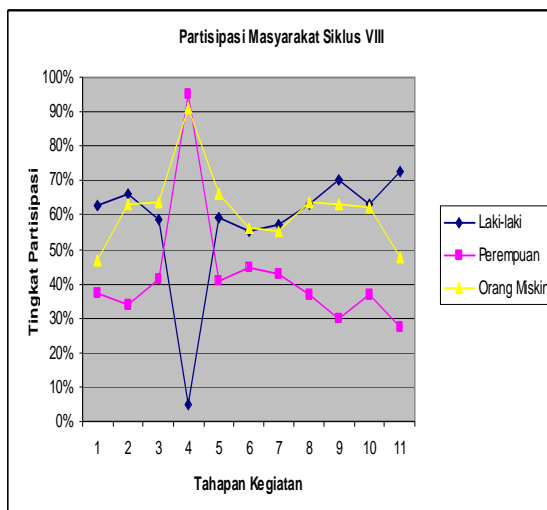
Tahapan Kegiatan:

1. Musyawarah Antar Desa I
2. Musyawarah Desa I
3. Penggalian Gagasan
4. Musyawarah Khusus Perempuan
5. Musyawarah Desa II
6. Musyawarah Antar Desa II
7. Musyawarah Antar Desa III
8. Musyawarah Desa III
9. Musyawarah Desa Pert. Jawaban
10. Musyawarah Desa Srh. Terima
11. Pemeliharaan Hasil Keg.

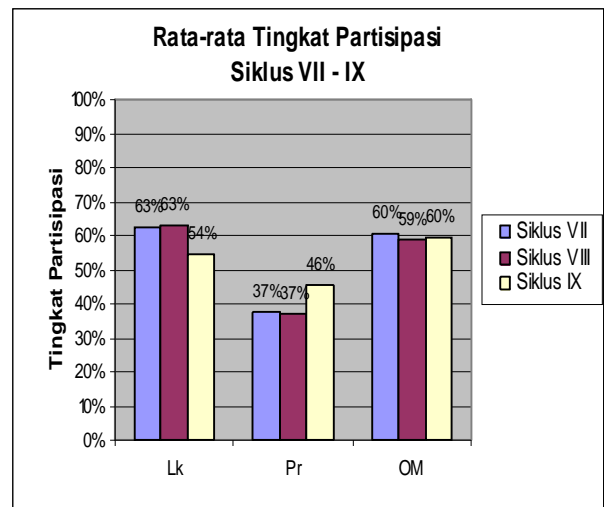
Keterangan 2

Lk = Laki-laki  
Pr = Perempuan  
OM = Orang Miskin

Gambar 2. Tingkat partisipasi Siklus VII.



Gambar 3. Tingkat partisipasi Siklus VIII.



Gambar 4. Rata-rata tingkat partisipasi.



### III. PENINGKATAN KAPASITAS & PENGEMBANGAN PROGRAM

---

Supervisi dan Monitoring pelaksanaan IST di provinsi maupun kabupaten masih menjadi agenda utama. Selain itu, training plan beserta anggarannya mulai disusun mengingat akan segera memasuki tahun 2008. Unit training juga turut dalam seleksi aktif calon spesialis regional maupun provinsi, terutama untuk posisi Sp. Training Regional.

Pada September 2007 ini, unit Training masih memfokuskan kegiatan pada supervisi dan monitoring pelaksanaan IST dengan menggunakan dana tambahan dimana IST ini dilaksanakan saat Rakor Provinsi maupun Kabupaten. Di samping itu, dalam rangka mempersiapkan media sosialisasi melalui visualisasi, dilakukan survey lokasi pengambilan gambar untuk Model Perencanaan PNPM. Terkait dengan pelaksanaan PNPM tahun 2008, Unit Training juga diminta untuk mempersiapkan Training Plan beserta estimasi Budgeting Pelatihan tahun 2008 dan turut dalam seleksi aktif calon spesialis Training Regional. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aktivitas di atas, sebagai berikut:

#### Permasalahan

1. Pelaksanaan In-service Training belum optimal dilakukan karena masih terkendala oleh kemampuan konsultan dalam melakukan need assessment pelatihan dan keterampilan dalam penyusunan matrik kurikulum.
2. Persiapan pelaksanaan pengambilan gambar media sosialisai PNPM masih menghadapi kendala karena padatnya kegiatan di lapangan.
3. Calon spesialis Training Regional yang mengikuti seleksi, dinilai belum memiliki kualifikasi yang diharapkan program terutama dari pengalaman kerja di bidang yang sama.

#### Saran dan Tindak lanjut

1. Spesialis Training Regional harus memberikan perhatian yang penuh dalam penyusunan matrik kurikulum untuk pelaksanaan In-service Training di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten.
2. Pengambilan gambar media sosialisai PNPM akan dilaksanakan setelah hari Raya Idul Fitri, mengingat pelaku-pelaku yang dilibatkan sebagai pemeran agar mempunyai persiapan yang cukup.
3. Diharapkan agar penyeleksi untuk calon spesialis memiliki komitmen bahwa dasar dari calon spesialis adalah memiliki pengalaman sebagaimana yang diharapkan program dan bukan dititikberatkan pada kemampuan calon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada panduan seleksi.



### III.1. DOK TAMBAHAN

Penggunaan DOK Tambahan (yang digulirkan bersamaan Siklus VI) hingga Agustus 2007 belum 100% tercairkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, dari 26 provinsi yang mendapatkan DOK Tambahan untuk pelatihan, sebanyak 336 kecamatan dari 675 kecamatan yang tersebar di 17 provinsi telah 100 persen menyelesaikan empat jenis pelatihan (Pelatihan Kades & BPD, TP3, BPUPK, Tim Monitoring, dan Lain-lain). Adapun 17 provinsi tersebut adalah: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Total peserta dari seluruh jenis pelatihan berjumlah 73.207 orang. Peserta paling banyak berasal pada pelatihan Kades & BPD, yaitu sejumlah 22.053 orang. Sedangkan pada pelatihan yang termasuk dalam kategori lain-lain, hanya berjumlah 4.890 orang (Tabel 23).

Tabel 23. Jumlah Peserta Pelatihan dengan DOK Tambahan

Jenis Peserta	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan (%)
Kades & BPD	22.053	653	96,7
TP3	21.814	656	97,2
BPUPK	4.794	651	96,4
Tim Monitoring	19.566	643	95,3
Lain-lain	4.980	110	50,0
Total	73.207	-	-

Berdasarkan hasil cross cek pada beberapa provinsi yang belum menuntaskan pelatihan, penyebab utama keterlambatan umumnya akibat banyaknya lokasi yang sudah phase out. Di lokasi tersebut tidak ada lagi FK yang mengkoordinir kegiatan, sehingga harus ditangani langsung oleh KM-Kab atau FK yang berada di lokasi terdekat namun kurang optimal. Selain itu, penyebab keterlambatan adalah adanya penyimpangan dana. Langkah-langkah untuk mempercepat kelanjutan pelatihan masih dalam tahap perumusan.

### III.2. PENINGKATAN KAPASITAS DI PROVINSI

Pada bulan sebelumnya, kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dilaporkan adalah per Juli 2007 karena pada bulan lalu baru 3 provinsi yang melaporkan. Pada bulan ini akan dilaporkan kegiatan per Agustus 2007. Banyaknya provinsi yang melaporkan kegiatan sejumlah 20 provinsi (termasuk Kep. Nias). Adapun 10 provinsi lainnya yang belum melaporkan adalah: Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat).

Berbagai jenis kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah, maupun konsultan berikut jumlah pesertanya dirinci dalam Tabel 24. Peserta kegiatan yang terbagi menjadi tiga bagian seperti diuraikan Tabel 24 di bawah didominasi oleh kelompok masyarakat, yaitu 849 orang (64%) dari 1.335 orang. Pelaku yang paling banyak dilatih dari Kelompok Masyarakat adalah Fasilitator Desa, sebanyak 142 orang, disusul oleh Tim Penulis Usulan sebanyak 137 orang. Sementara itu, dari kelompok aparat pemerintah sejumlah 157 orang tercatat sebagai peserta dengan perincian: tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi masing-masing sebanyak 36, 102, 16, dan 1 orang. Aparat pemerintah di tingkat kecamatan paling banyak dilatih, terkait dengan posisi PJOK dan PJAK.



Tabel 24. Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Jenis Pelatihan terhadap Jumlah Pelaku

JENIS KEGIATAN	Agustus 2007			
	M	P	K	Jumlah
Pra Tugas	267	48	66	381
Penyegaran	48	19	33	100
IST	166	32	100	298
OJT	301	17	41	359
WS/Lokakarya	0	4	0	4
Rakor Bulanan	32	27	62	121
Rapat Kerja	3	0	0	3
Hearing	0	0	0	0
Lain-lain	32	10	27	69
Jumlah	849	157	329	1.335

Keterangan: M=Masyarakat; P=Pemerintah; K=Konsultan; Satuan angka pada tabel dalam (orang)

Berdasarkan sumber pendanaan pelatihan, DOK Kecamatan masih merupakan sumber yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar Rp1,275 miliar. Walaupun DOK Pelatihan Masyarakat secara khusus telah dialokasikan pada PNPM-PPK 2007, namun pencairannya masih minim. Sumber pendanaan pelatihan secara lengkap diperlihatkan Tabel 25.

Tabel 25. Alokasi Dana dan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Bln	Alokasi Dana									
	DOK		Swadaya Konsultan		Swadaya Masyarakat		BOP UPK		Lain-lain	
	# Keg.	Besarnya (juta Rp)	# Keg.	Besarnya (juta Rp)	# Keg.	Besarnya (juta Rp)	# Keg.	Besarnya (juta Rp)	# Keg.	Besarnya (juta Rp)
Agt	480	1.274,978	100	11,336	118	2,737	1	0,05	13	5,845

Keterangan: #Keg. = Banyaknya kegiatan pelatihan dengan menggunakan dana terkait.

Ditinjau dari komposisi peserta berdasarkan jenis kelamin, peserta laki-laki lebih banyak dari peserta perempuan. Dari 780 kegiatan yang telah dilaksanakan, peserta pria berjumlah 10.942 orang dan peserta perempuan 8.540 orang. Sedangkan materi yang disampaikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: untuk Pelatihan PNPM-PPK (Reguler) dan Pelatihan program pilot PNPM Generasi (Tabel 26).

Tabel 26. Materi Pelatihan Periode Agustus 2007

Bulan	Materi Baru
PNPM-PPK (Reguler)	1. Konsepsi PNPM-PPK, Errata PTO PPK-3, Media Sosialisasi PNPM-PPK, Strategi Kualitas Pendampingan PNPM-PPK, dan Teknik Perencanaan Partisipatif
	2. Sosialisasi Kebijakan Periode Pertengahan April–Mei 2007, Penyerapan Dana BLM PPK 2 dan PPK 3 ke desa. Justifikasi, Solusi, dan Estimasi
	3. Konsep Pendataan RTM, MMDD, dan P2SPP.
	4. Pengenalan Tipe Kelompok Solid menurut standar PNPM-PPK.
	5. Aturan Baru PNPM-PPK, SOP, BP UPK, dan Data Base UPK
	6. Pengesahan Pembentukan BKAD
	7. Metode Memimpin dan mengendalikan forum



Bulan	Materi Baru
PNPM Generasi	1. Konsepsi PNPM Generasi
	2. Tupoksi FD Generasi
	3. Alur dan mekanisme PNPM Generasi
	4. Tahapan PNPM Generasi
	5. Pemahaman 12 indikator dalam PNPM Generasi

### III.3. PENGEMBANGAN PROGRAM

PPK yang dimulai sejak tahun 1998 dipandang cukup berhasil memberdayakan masyarakat, sehingga beberapa proyek percontohan dicangkokkan ke dalam PPK, termasuk di lokasi bencana seperti di provinsi NAD dan Sumatera Utara (Kep. Nias). Proyek percontohan yang telah dituntaskan pada Maret 2007 lalu adalah Pilot Kesehatan (difokuskan pada Water Sanitation) dimana pelaksanaannya bekerja sama dengan Departemen Kesehatan. Begitu juga dengan Pilot Pendidikan, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan saat ini sedang dirintis kesepakatan untuk melanjutkan kegiatan. Selain itu, proyek pilot P2SPP juga diperluas lokasi cakupannya, namun untuk bulan ini tidak dapat dilaporkan karena spesialis terkait telah mengundurkan diri.

### PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Kegiatan Pilot Pendidikan yang sedianya dapat dilaksanakan pada awal semester II tahun ini, ternyata hingga saat ini masih mengalami hambatan karena masih menunggu NOL amandemen PT Amythas sebagai perusahaan pengelola administrasi. Sedangkan tahapan kegiatan PNPM Generasi telah dimulai dan langsung dilakukan supervisi serta monitoring oleh Bank Dunia. Adapun kegiatan pendidikan pada program reguler, bulan ini masih menyusun panduan supervisi dan monitoring. Panduan ini meliputi: pemeriksaan pekerjaan, manajemen tim dan peningkatan kapasitas FK/masyarakat.

#### Pilot Pendidikan

Perkembangan kegiatan Pilot Pendidikan belum mengalami perubahan yang berarti karena masih terkendala pendanaan yang harus masuk dalam amandemen PT. Amythas. Namun demikian, berbagai aktivitas persiapan tetap dilakukan, seperti: modul pelatihan, perencanaan pelatihan penyegaran bagi FK-Pendidikan, dan identifikasi FK yang masih relevan untuk mengikuti Pilot Pendidikan. Direncanakan FK-Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan berjumlah 19 orang, terdiri dari 14 orang FK lama dan 5 orang FK baru.

#### Masalah dan Rekomendasi

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilot Pendidikan adalah:

1. Pelatihan Penyegaran bagi FK-Pendidikan belum dapat dilaksanakan pada bulan September 2007 karena waktu yang sempit. Ditargetkan pada Oktober 2007 mendatang dapat direalisasikan.
2. Pencairan dana BLM tidak memungkinkan dapat dicairkan seluruhnya pada Desember 2007 karena aktivitas di lapangan baru dimulai bulan November 2007 setelah Pelatihan Penyegaran FK-Pendidikan (Oktober 2007).
3. Hingga saat ini belum tersedia FT bagi lokasi non-PNPM PPK.
4. Spesialis Pendidikan harus turut menangani PNPM Generasi karena belum adanya spesialis terkait. Akibatnya perhatian untuk kegiatan pendidikan berkurang.



Untuk itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. KM-Nasional mempersiapkan Nota Dinas kepada Satker Pusat untuk menegaskan bahwa kegiatan Pilot Pendidikan tidak akan dapat menyerap dana maupun menyelesaikan kegiatan pada Desember 2007.
2. Diharapkan FT untuk lokasi Pilot Pendidikan non-PNPM PPK dapat segera ditempatkan agar segera dilakukan OJT oleh KM-Teknik masing-masing lokasi.
3. Agar kegiatan pendidikan lebih terfokus, spesialis/koordinator PNPM Generasi perlu segera direkrut.

#### PNPM Generasi

Kegiatan PNPM Generasi relatif lebih banyak mendapat perhatian dari Bank Dunia sehingga pada bulan ini perkembangan tahapan kegiatan di lapangan dipantau secara langsung. Aktivitas utama pada September 2007, diantaranya:

- a. Supervisi dan monitoring pelaksanaan PNPM Generasi di lapangan. Dari kegiatan ini diperoleh temuan-temuan sebagaimana ditampilkan Tabel 27.

Tabel 27. Temuan Hasil Supervisi dan Monitoring PNPM Generasi

Provinsi	Temuan	
	Kegiatan	Keterangan
Jawa Barat	<p>Pelatihan TPK2 di kab. Sukabumi, Sumedang, dan Kuningan.</p> <p>Posisi kosong sebanyak 24 orang FT dan 1 orang FK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses FGD di kab. Sukabumi dihadiri oleh 90 orang, oleh FK dan PJOK dibagi menjadi 4-5 kelompok. Masyarakat cukup paham tentang FGD, dan hasil yang FGD cukup variatif. KM-Kab. sangat mendukung FK.</li> <li>• Pelatihan TPK 2 di kab. Sumedang, sedikit kesulitan dalam menyusun prioritas gagasan yang ada dan skoring cukup rumit. KM-Kab. kurang mendukung FK, dimana penjelasan terhadap pertanyaan kurang direspon.</li> <li>• Pelatihan TPK 1 dan 2 di kab. Kuningan sebagian telah memanfaatkan peta sosial desa.</li> </ul>
Jawa Timur	<p>Pelatihan TPK 1 di kab. Malang, Pamekasan, dan Trenggalek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terkesan hanya mengejar RKT dan kurang memperhatikan kualitas tahapan</li> <li>• FK dan FD kurang memahami 12 indikator karena saat pelatihan kurang ditekankan</li> <li>• Peserta kurang memahami kegunaan peta sosial dan perhitungan jumlah sasaran.</li> <li>• Peserta dan mungkin FD/FK kurang memahami apa bedanya sasaran dan pemanfaat</li> <li>• TPK belum memahami PNPM Generasi dan tugas-tugas mereka</li> <li>• Waktu pelatihan setiap hari</li> </ul>



Provinsi	Temuan	
	Kegiatan	Keterangan
		berkisar antara 3-4 jam saja <ul style="list-style-type: none"> <li>• FK kurang persiapan dalam pelatihan TPK</li> <li>• FK belum terampil dalam pengisian formulir</li> <li>• Banyaknya pertanyaan yang perlu jawaban segera dan kurang dapat dijawab, baik oleh FK/KM maupun Korprov</li> </ul>
Gorontalo	-	Belum dilaksanakan
Sulut	-	Belum dilaksanakan
NTT	-	Belum dilaksanakan

- b. Pelatihan Pratusas (tambahan) FK PNPM Generasi. Pelatihan ini dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dengan peserta berjumlah 27 orang (13 orang FT dan 14 orang FK) dimana undangan seharusnya berjumlah 30 orang (18 orang FT dan 12 orang FK). Kelebihan peserta calon FK telah dikonfirmasi kepada KM-Nasional berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Dari 27 orang peserta, 25 orang diantaranya ditempatkan. Sisanya 2 orang menjadi cadangan, tetapi salah seorang tidak bersedia ditempatkan di luar Jawa Barat dan masih terikat kontrak dengan lembaga lain.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta relatif telah mengetahui tujuan, pengertian, sasaran, dan indikator program dan dapat menjelaskan dengan baik. Akan tetapi, substansi program belum difahami dengan baik. Begitu pula dengan metode fasilitasi, masih cenderung bersifat ceramah dan kurang partisipatif. Dari sisi persiapan media simulasi, terjadi keterlambatan sehingga peserta harus menunggu. Keterlambatan koordinasi antara BPMD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan juga berpengaruh terhadap kegiatan ini. Akibatnya, narasumber belum siap (diantaranya belum menyiapkan hand out materi presentasi).

- c. Persiapan dan identifikasi kebutuhan media sosialisasi dan media pendukung kegiatan lainnya, seperti: PTO, flipchart, info kit dan Buku KIA, buku kupon serta stempel kupon. Amandemen PT. Amythas yang memerlukan waktu sekitar satu bulan menyebabkan proses printing media sosialisasi terhambat. Setelah terbit NOL untuk amandemen tersebut, maka maka persiapan terkait dapat dilakukan, antara lain: mengumpulkan data jumlah desa, bidan, layanan kesehatan dan jumlah sasaran. Data tersebut harus disampaikan kepada KM-Nasional sebelum hari Raya Idul Fitri dan segera ditindaklanjuti dengan pencetakan serta distribusi pada akhir Oktober 2007.

#### Masalah dan Rekomendasi

Beberapa masalah yang dapat dirangkum dalam pelaksanaan PNPM Generasi adalah:

1. Pertanyaan mengenai realisasi kegiatan di lapangan masih banyak. Di samping itu, pengetahuan mengenai PNPM Generasi (termasuk mengenai indikator keberhasilan dan keterkaitan PNPM Generasi dan PNPM-PPK) belum dipahami oleh pelaku di tingkat desa dan kecamatan. Salah satu akibatnya, implementasi di provinsi Jawa Timur lebih mengejar RKTTL daripada melaksanakan kegiatan secara berkualitas.



2. Laporan kegiatan PNPM Generasi belum seragam.
3. Walaupun telah dilakukan pelatihan tambahan, Provinsi Jawa Timur dan Gorontalo masing-masing masih terjadi kekosongan fasilitator sebanyak 2 orang dan 1 orang.
4. Pengadaan Buku KIA yang cukup banyak (sekitar 216.000 eksemplar) membutuhkan waktu lama sehingga diperkirakan Buku KIA baru dapat didistribusikan pada pertengahan November 2007.

Untuk itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai program pilot ini (bagi FK/FT) dapat ditingkatkan (misalnya: PNPM Generasi adalah bagian PNPM-PPK, RKTU perlu dilaksanakan namun kualitas perlu dijaga, dll.) melalui IST sehingga FK dapat memfasilitasi pelaku kegiatan di tingkat desa lebih baik lagi. Selain itu, perlu supervisi KM-Nasional saat Rakor tingkat FK sebagai spot checking terhadap IST yang diberikan oleh KM-Kabupaten.
2. Supervisi dan monitoring kegiatan perlu dijadwalkan oleh KM-Nasional agar rencana kegiatan dan kualitas dapat terjaga dengan baik.
3. Kekosongan fasilitator di Jawa Timur dan Gorontalo, juga kekosongan spesialis PNPM Generasi akan segera dikoordinasikan dengan Satker Pusat.
4. Memorandum mengenai panduan pelaporan akan disusun oleh KM-Nasional agar laporan yang diterima lebih seragam dan sesuai dengan kebutuhan.



## IV. MONITORING DAN EVALUASI

---

Supervisi IST di provinsi maupun kabupaten dan TOT P2SPP masih mewarnai kegiatan Monev bulan ini. Sedangkan audit internal belum dilaporkan karena personil hanya satu orang dan disibukkan oleh tugas-tugas seleksi aktif serta pelatihan. Sementara itu, rekapitulasi penanganan masalah mencatat bahwa 864 masalah terakumulasi di bulan September 2007 dimana 37 diantaranya dinyatakan selesai.

Monitoring dan evaluasi bulan ini difokuskan pada kegiatan IST yang sudah berjalan selama dua bulan, di samping monitoring terhadap kegiatan lainnya seperti pelatihan Pratugas dan TOT P2SPP. Akan tetapi, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara khusus belum dilakukan, akibat agenda yang cukup padat dalam memenuhi kekosongan konsultan dan pelatihan. Namun demikian, di sela-sela monitoring IST di kabupaten, KM-Nasional menyempatkan mengunjungi lokasi (misal: kantor UPK) untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.

Memperhatikan perkembangan penanganan masalah PPK, lebih dari 50% masalah selama 6 bulan terakhir mengalami stagnasi. Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari pelaku-pelaku PPK terutama TK PNPM-PPK, konsultan lapangan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayahnya. Jika masalah tersebut berlarut-larut dan tidak ada dukungan penanganan dari pemerintah setempat maupun masyarakat, maka lokasi tersebut dapat dimasukkan dalam kriteria kecamatan bermasalah sehingga tidak bisa didanai lagi pada tahun yang akan datang.

### IV.1. KUNJUNGAN LAPANGAN

Seperti telah diketahui, kunjungan lapangan (perjalanan dinas) merupakan aktivitas dan kewajiban rutin KM-Nasional setiap bulan. Hal ini tertuang dalam TOR bahwa KM-Nasional berkewajiban untuk melakukan perjalanan dinas kurang lebih 50% dari hari kerjanya. Perjalanan dinas dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan program.

Pada bulan ini, kunjungan lapangan cukup padat dan melibatkan banyak personil. Masih berkaitan dengan kebijakan penambahan pelatihan berupa IST untuk KM-Kab./KM-Teknik (saat rakor provinsi) dan untuk FK/FT (saat rakor kabupaten) yang dimulai pada Agustus 2007, maka supervisi dan monitoring IST baik di provinsi maupun kabupaten terus dilakukan. Agenda lain yang mewarnai kegiatan adalah seleksi aktif calon spesialis di beberapa provinsi dan supervisi Pelatihan Pratugas FK/FT Gel. III. Pelatihan Pratugas ini dilaksanakan pada akhir September sehingga dari sisi waktu perjalanan dinas, lebih banyak mengambil waktu di bulan Oktober 2007.

Tabel 28. menunjukkan rangkuman perjalanan dinas yang dilakukan pada September 2007. Dari 22 personil KM-Nasional, kunjungan terbanyak dilakukan oleh spesialis Training Masyarakat, yaitu selama 27 hari kerja (90% dari hari kerja dalam satu bulan). Adapun kunjungan ini dilakukan dalam rangka seleksi aktif calon konsultan spesialis,



fasilitasi TOT Setrawan proyek pilot P2SPP, serta supervisi dan monitoring Pelatihan Pratugas FK/FT Gel. III.

Tabel 28. Realisasi Kunjungan Lapangan Per September 2007

N O.	NAMA	LOKASI		KEGIATAN YANG DILAKUKAN	Lama (hari)	Total Perja-lanan	Prosen-tase (%)
		PROVINSI					
1	Anthony Torrens	SumUt dan NAD		Supervisi RKTL Khusus Aceh dan Monitoring Persiapan Proyek Perumahan (R2PN) Nias	4	4	13%
2	Abdul Latip	SumBar dan SumSel		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	5	17%
3	Yayuk Wuriati	JaBar, Yogya dan Jateng		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	11	37%
4	Yayuk Wuriati	Sulawesi Tengah		Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance	6		
5	Agus Prasetyono	Jatim dan NTB		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	5	17%
6	Dessy Setyawati	NTT dan Bali		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	10	33%
7	Dessy Setyawati	Sulawesi Tenggara		Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance	5		
8	Hendry Syafaruddin	KalSel dan SulTra		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	10	33%
9	Hendry Syafaruddin	Bengkulu		Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance	5		
10	Agus Triantara	SulSel dan Papua		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	13	43%
11	Agus Triantara	Maluku Utara		Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance	8		
12	Achmad Rabin Taim	SulUt dan MalUt		Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM	5	5	17%
13	Chamiyatus Sidqiyah	Sumatera Utara		Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK	4	27	90%
14	Chamiyatus Sidqiyah	Sumatera Selatan		Memfasilitasi TOT pelatihan Setrawan Pilot P2SPP	9		
15	Chamiyatus Sidqiyah	Kalimantan Timur		Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	9		
16	Chamiyatus Sidqiyah	Jawa Tengah		Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK	5		
17	Nurlily Basri	Jawa Timur		Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK	4	10	33%
18	Nurlily Basri	Papua Barat		Supervisi dan Monitoring IST	6		
19	Endah Nurdartilah	Jawa Timur		Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK	4	20	67%
20	Endah Nurdartilah	Bangka Belitung		Supervisi dan Monitoring IST	4		
21	Endah Nurdartilah	Bali		Pelatihan TOT P2SPP Setrawan	7		
22	Endah Nurdartilah	Jawa Tengah		Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK	5		
23	Lendy Wibowo	Sulawesi Selatan		Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK	4	17	57%
24	Lendy Wibowo	Bali		Narasumber dan Supervisi Pelatihan BKAD/Lembaga Masy	4		



N O.	NAMA	LOKASI	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	Lama (hari)	Total Perjalanan	Prosentase (%)
		PROVINSI				
25	Lendy Wibowo	Lampung	Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	9		
26	Soenoe Widjajanti	Sulawesi Selatan	Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK	4	23	77%
27	Soenoe Widjajanti	Papua	Supervisi dan Monitoring IST	6		
28	Soenoe Widjajanti	Jawa Barat	Pelatihan FK PNPM Generasi	13		
29	Sansan T. Umarna	Sulawesi Selatan	Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK	4	22	73%
30	Sansan T. Umarna	Maluku	Supervisi dan Monitoring IST	5		
31	Sansan T. Umarna	Kalimantan Barat	Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	8		
32	Sansan T. Umarna	Jawa Timur	Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK	5		
33	Nofrizal	Jawa Tengah	Survey Kegiatan Media Sosialisasi PNPM	3	22	73%
34	Nofrizal	Jawa Tengah	Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance	5		
35	Nofrizal	Jawa Timur	Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK	5		
36	Nofrizal	Sulawesi Selatan	Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	9		
37	Arif Setyabudhi	Jawa Tengah	Survey Kegiatan Media Sosialisasi PNPM	3	17	57%
38	Arif Setyabudhi	Sumatera Barat	Melakukan IST Identifikasi Kerusakan Bangunan	5		
39	Arif Setyabudhi	Kalimantan Tengah	Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	9		
40	M. Ikhwan Maulana	Jawa Barat	Mendampingi Kunjungan Wartawan ke Lokasi PNPM-PPK	1	1	3%
41	Suudi Noor	Sumatera Utara & Nias	Supervisi dan Monitoring IST	5	5	17%
42	Erni Yanti Siregar	Papua	OJT Pembuatan Laporan dan Analisis Keterlambatan Progres	5	5	17%
43	Arris Hakim Lybrianto	Sumatera Utara	Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	9	9	30%
44	Yan Budi Triyani	Sulawesi Tengah	Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT	9	9	30%
45	Agung H Budi	Sulawesi Selatan	Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK	5	5	17%

Melihat frekuensi perjalanan dinas bulan ini, prosentase rata-rata sebesar 58% (251 hari/(29 orang x 15 hari) x 100%), atau rata-rata 8,6 hari kerja/orang dari seluruh KM-Nasional yang aktif. Akan tetapi, sejumlah 251 hari tersebut, 72 hari diantaranya masuk ke dalam bulan Oktober, sehingga jumlah hari perjalanan dinas yang benar-benar dilakukan pada bulan September adalah 204 hari (sudah termasuk yang terdaftar pada perjalanan bulan lalu).

Angka rata-rata 58% tersebut secara total belum mencapai target 15 hari kerja (sesuai dengan TOR KM-Nasional) atau masih kekurangan 42% (sekitar 6 hari kerja). Sementara itu, dari 22 orang KM-Nasional yang melakukan kunjungan lapangan, diperoleh prosentase rata-rata sebesar 76% (251 hari/(22 orang x 15 hari) x 100%). Artinya lama perjalanan rata-rata adalah 11,4 hari kerja/orang. Angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Diharapkan perjalanan dinas yang padat relevan dengan output yang ada agar efektivitas perjalanan dinas dapat dicapai.



## IV.2. STATUS PENANGANAN MASALAH

Pada laporan bulan September 2007 ini, data permasalahan dari provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data pada bulan lalu karena saat laporan disusun, laporan dari provinsi tersebut belum diterima. Secara umum, beberapa provinsi agak terlambat mengirimkan laporan. Hal ini terjadi karena adanya libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1428H. Walaupun demikian, kondisi ini seharusnya dapat dihindari jika provinsi mengantisipasi dengan cara mengumpulkan laporan dari lapangan lebih awal.

Pada laporan bulan ini, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi atas jumlah masalah dimana pada bulan sebelumnya penyelewengan dana yang terjadi pada empat desa di kecamatan Baki kabupaten Sukoharjo masing-masing dipisah tetapi pada laporan bulan ini digabung menjadi satu kasus. Disamping itu, terdapat satu perubahan kategori dari 1 menjadi 3 pada provinsi NAD dan satu perubahan kategori dari 2 menjadi 4 pada provinsi Papua. Hal ini menjadikan jumlah masalah secara nasional mengalami perubahan.

Secara total, pada bulan September 2007 jumlah masalah mengalami penurunan sebanyak 13 kasus menjadi 864 masalah yang terdiri atas 825 masalah sisa bulan lalu (setelah revisi) ditambah 39 masalah baru bulan September 2007. Dari 825 masalah sisa bulan Agustus tersebut, terdapat 28 masalah telah ditangani sampai selesai pada bulan September 2007 dan 797 masalah masih dalam proses penanganan sedangkan dari 39 masalah baru pada bulan ini, 9 masalah langsung dilaporkan selesai dan 30 masalah masih dalam proses penanganan. Masalah yang baru dilaporkan dan langsung selesai terjadi di provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Untuk provinsi Jambi, 2 masalah kategori lain-lain langsung dilaporkan selesai semuanya berasal dari kabupaten Sarolangun kecamatan Mandiangin.

Sementara itu, 2 masalah kategori penyimpangan dana di Sulawesi Selatan yang langsung dilaporkan selesai terjadi di desa Bangun Jaya dan desa Lestari kec. Tomoni kab. Luwu Timur dengan adanya pengembalian lunas oleh pelaku terhadap dana yang telah diselewengkan. Pada provinsi Sumatera Barat, 1 kasus penyimpangan dana dan 4 kasus lain-lain langsung dinyatakan selesai pada bulan ini. Secara keseluruhan, total masalah yang ditangani pada bulan September 2007 berjumlah 864 masalah, 37 masalah selesai ditangani dan 827 masalah masih dalam proses penanganan. Rekapitulasi perkembangan dan status penanganan masalah dalam 3 bulan terakhir dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Perkembangan Penanganan Masalah

No	Bulan	Periode	Kategori Masalah					Jumlah	%
			1	2	3	4	5		
1	Juli-07		108	688	3	6	39	844	97,0%
2	Agt-07		99	682	3	6	38	828	94,4%
3	Sept-07	Baru	1	22	0	3	13	39	4,5%
		Total	99	700	4	10	51	864	
		Selesai	9	13	1	1	13	37	4,3%
		Dalam Proses	90	687	3	9	38	827	95,7%

Ket: Kategori 1 : Penyimpangan prinsip dan prosedur Kategori 4 : Force Majeur  
 Kategori 2 : Penyalahgunaan dana Kategori 3: Intervensi Kategori 5 : Lain-lain



## PENGADUAN & PELAKU PELANGGARAN

SMS yang masuk melalui unit pengaduan masalah pada bulan September ini pada umumnya bersifat informatif diantaranya pertanyaan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan program, pelaksanaan rekrutmen konsultan, honor pelaku PPK terutama FD dan lain-lain. Disamping itu terdapat pula pengaduan melalui sms yang isinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan program (pengaduan lainnya) diantaranya pengaduan tentang seorang PNS yang membeli rumah tidak sesuai prosedur. Ada juga pengaduan mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap koperasi di desanya. Pengaduan yang berbentuk surat diantaranya berita acara hasil hearing atas dugaan pelanggaran kode etik dan informasi mengenai status penanganan masalah kecamatan Cikeusik (kab. Pandeglang, Banten).

Berdasarkan matriks masalah bulan September 2007, terdapat 25 masalah baru yang dilaporkan oleh konsultan dan 14 masalah baru dilaporkan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, konsultan masih sebagai pelapor/ penemu terbanyak dengan 739 masalah (Tabel 30), disusul pengaduan langsung masyarakat dan audit BPKP. Sumber pengaduan yang paling rendah adalah media massa dengan 3 masalah. Temuan audit BPKP belum semuanya dimasukkan dalam matrik masalah karena menggunakan format yang berbeda dari provinsi.

Tabel 30. Sumber Pengaduan/Masalah

No	Sumber Informasi	Jumlah Masalah	Prosen-tase
1	Konsultan	739	85,53%
2	Pengaduan Langsung Masy.	66	7,64%
3	Audit BPKP	32	3,70%
4	Lain-lain	11	1,27%
5	LSM/PBM	7	0,81%
6	Supervisi Bank Dunia	6	0,69%
7	Media Massa	3	0,35%
	Total	864	100,0%

Tabel 31. Pelaku Masalah/Pelanggaran

No	Pelaku	Jumlah (orang)	Prosen-tase
1	Masyarakat/Kelompok	272	25,05%
2	UPK	252	23,20%
3	TPK	174	16,02%
4	Konsultan	101	9,30%
5	Kades/Aparat Desa	81	7,46%
6	Lain-lain	71	6,54%
7	PjOK&Staf Kec	53	4,88%
8	LKMD/LPM	49	4,51%
9	Camat	21	1,93%
10	Suplier	12	1,10%
	TOTAL	1.086	100.0%

Seiring berkurangnya jumlah masalah, total pelaku pelanggaran/ masalah dalam kegiatan PPK mengalami penurunan sebanyak 6 dari bulan sebelumnya menjadi 1.086 orang. Pada bulan ini terdapat 55 pelaku baru yang dilaporkan, diantaranya 17 pelaku masyarakat/ kelompok dan 10 pelaku UPK. Secara keseluruhan, pelaku masalah/pelanggaran pada bulan ini masih didominasi oleh kelompok/masyarakat (Tabel 31) sebanyak 272 orang (25,05%) disusul pelaku masalah/pelanggaran terbanyak kedua adalah UPK sebanyak 252 orang (23,20%) dan pelaku pelanggaran terbanyak ketiga adalah TPK sebanyak 174 orang (16,02%).

## MASALAH DERAJAT-4 dan MASALAH SULIT

Jumlah masalah derajat-4 pada bulan September ini tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya dengan 16 kasus, yang terdiri atas 3 kasus masalah penyimpangan prinsip dan prosedur, 12 kasus masalah penyimpangan dana dan 1 kasus masalah lainnya. Masalah yang dinilai sulit diselesaikan berdasarkan data dari provinsi tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya yaitu 152 masalah. Kemungkinan jumlah ini akan berubah setelah konsultan pusat atau provinsi melakukan verifikasi lapangan yang hingga saat ini belum bisa dilaksanakan.



KM-Nasional dan Sekretariat PPK Pusat masih tetap mengagendakan upaya khusus untuk penataan kasus - kasus yang tergolong sulit diselesaikan. Dukungan lain terhadap kasus-kasus berderajat-4 yang masih terbuka peluang penanganan adalah melalui supervisi dan monitoring penanganan masalah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Korprov dan Sp.MonEv dalam rangka mendiskusikan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan penanganan masalah.

## MASALAH MENONJOL

Pada bulan lalu terdapat dua kasus di kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah selesai penanganannya sehingga dikeluarkan dari kasus menonjol pada bulan ini. Namun demikian, pada bulan ini muncul dua kasus penyimpangan dana baru di provinsi Jawa Tengah dengan nilai penyimpangan relatif besar sehingga layak untuk dimasukkan dala kasus menonjol. Kasus menonjol pada bulan lalu yang belum selesai penanganannya tetap dimunculkan kembali pada bulan ini sebagai masalah menonjol. Kasus-kasus tersebut berasal dari provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua sebagaimana ditampilkan Tabel 32.

Tabel 32. Matriks Masalah Menonjol Per September 2007

No.	Lokasi	Uraian Masalah
1.	Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat	Penyalahgunaan dana oleh ketua UPK yaitu Sdr. Maksum. Kejadian ini dimulai saat transisi PPK I ke PPK II dan diindikasikan melibatkan TK PPK saat itu (sdr. Nasrun). Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh P-UPK, nilai dana yang diselewengkan mencapai Rp647,385 juta. Modus operandi yaitu pemalsuan semua buku rekening UPK dan rekening koran. Specimen rekening UPK hanya satu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ketua UPK dengan leluasa menyimpan dan mengambil uang. Pada awal Juli 2007, tersangka ditahan dalam rangka proses penyidikan. Selain itu juga masih dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan terhadap saksi-saksi, baik itu pengurus UPK maupun dari KM-Nasional. Hingga akhir September 2007, proses penyidikan oleh kejaksaan baru mencapai 75%.
2.	Kec. Takkalla, kab. Wajo, Sulsel.	Pada UPK kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan selisih di neraca sebesar Rp. 502.635.705,-. Yang telah diselewengkan oleh pengurus UPK. Rapat khusus di kantor camat Takkalalla, melibatkan kadis PMD dan anggota TK-PPK lainnya telah digelar dan hasilnya dilanjutkan melalui jalur hukum. Berdasarkan perjanjian, bahwa pelaku akan mengembalikan dana minimal 40% (Rp70 juta). Hingga Jan 2007, pelaku baru mengembalikan dana sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 27 April 2007, pihak Polda telah menyarankan kepada Polres untuk segera melakukan gelar perkara di Polres. Pada akhir Juli dilakukan pertemuan tim audit dengan penyidik Polres Wajo. Pada tanggal 16 Agustus 2007 sudah terbentuk tim pengalihan aset/jaminan keluarga tersangka dan hingga saat ini belum ada progres yang signifikan.
3.	Distrik Assue, kab. Merauke, Papua	Pada bulan Januari 2004, dana matching grand sebesar Rp500 juta telah dicairkan oleh camat (sekarang mantan) sebesar Rp303,2 juta tanpa melalui mekanisme PPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada akhir Juni 2006, Monev bersama KM dan tim advokasi LSM Forpamer menghadap kepala kejaksaan negeri Merauke untuk menindaklanjuti kasus ini dan Kepala kejaksaan berjanji untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Hingga sekarang, kasusnya mengalami stagnasi penanganan di kejaksaan.
4.	Kecamatan Karanggede, kabupaten Boyolali, provinsi Jawa Tengah	Ketua UPK (Adde Currie S.) telah menggunakan dana perguliran sebesar Rp257,704 juta untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh yang bersangkutan



No.	Lokasi	Uraian Masalah
		setelah sebelumnya pada tahun 2005 juga telah melakukan hal yang sama dan telah selesai penanganannya pada September 2005 setelah pelaku mengembalikan uang yang diselewengkan sebesar Rp115 juta. Sesuai hasil MAD pertanggungjawaban saat itu, maka yang bersangkutan tetap menjabat sebagai pengurus UPK. Penanganan yang telah dilakukan untuk kasus kali ini diantaranya pada tanggal 27 September 2007 telah dilakukan MAD yang menghasilkan keputusan ketua UPK mengakui telah menyelewengkan dana dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2007, jika tidak terealisasi bisa diproses secara hukum. Selain itu, ketua dan sekretaris UPK akan mengundurkan diri setelah masalah selesai tanggal 30 Oktober 2007.
5.	Kecamatan Karangreja, kabupaten Purbalingga, provinsi Jawa Tengah	Penyalahgunaan dana UEP dan SPP yang dilakukan oleh TPK, ketua kelompok dan kepala desa di 5 desa dengan total nilai sebesar Rp170 juta. Pada tanggal 24 Juli 2007 telah dilakukan MAD yang memutuskan bahwa pelaku diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah hingga Agustus 2007 dan bila tidak dilunasi akan dilanjutkan pada jalur hukum. Progres pengembalian sampai dengan akhir September 2007 sebesar Rp65,3 juta dan hingga saat ini masih dalam penanganan pelaku-pelaku PNPM-PPK di lapangan.

## PENANGANAN MASALAH PENYALAHGUNAAN DANA

Berdasarkan matriks bulan September 2007 tercatat 700 masalah penyalahgunaan dana dengan 678 diantaranya merupakan sisa proses bulan Agustus 2007 ditambah 22 kasus baru yang dilaporkan pada bulan September 2007. Dari 678 kasus sisa Agustus 2007, nilai penyelewengan mencapai Rp19,497 miliar dengan pengembalian sebesar Rp3,559 miliar. Sedangkan untuk 22 kasus baru selama September 2007, nilai penyelewengan mencapai Rp949,835 juta dengan nilai pengembalian Rp126,3 juta. Secara keseluruhan dari total 700 kasus penyimpangan pada bulan ini, nilai penyimpangan adalah Rp20,447 miliar dengan nilai pengembalian Rp3,686 miliar. Dari 700 kasus tersebut, 13 diantaranya selesai dan 687 masih dalam proses penanganan. Data selengkapnya masalah penyimpangan dana PPK pada bulan September 2007 terdapat pada Tabel V lampiran.

## PENANGANAN MASALAH MELALUI PROSES HUKUM FORMAL

Masalah yang diproses melalui hukum formal mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus dari bulan sebelumnya. Secara total, jumlah kasus dalam proses di kepolisian pada bulan ini menjadi 103 kasus, dalam proses di Kejaksaan sebanyak 57 kasus, pengadilan 4 kasus dan tidak ada kasus dengan putusan tetap pengadilan sehingga total kasus dalam penanganan hukum adalah 164 kasus.

### IV.3. KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

Seperti pada bulan sebelumnya, Kegiatan KIE pada bulan September 2007 lebih difokuskan pada penyebaran informasi dan dukungan sosialisasi PNPM yang dilaksanakan melalui PPK (PNPM-PPK). Upaya penyebaran informasi dilakukan melalui media atau sarana yang sudah ada di PPK antara lain penerbitan Buletin PPK, penyajian informasi dalam situs internet PPK, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye/ sosialisasi PNPM Mandiri. Selain itu, pada bulan ini juga mengembangkan media komunikasi lainnya dengan memanfaatkan even yang relevan dengan kegiatan PPK.

Selaras dengan fokus pelaksanaan kegiatan IEC, maka pada bulan September 2007 telah dilakukan beberapa hal terutama berkaitan dengan sosialisasi dan pengenalan PPK



kepada sejumlah stakeholders. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sejumlah materi dan dukungan ke lapangan untuk penyiapan acara sosialisasi PNPM Mandiri.
- b. Penyebaran atau diseminasi berita yang berkaitan dengan PPK baik melalui jaringan e-mail maupun situs internet PPK.
- c. Pemutakhiran dan pengumpulan informasi maupun profil lokasi PPK hingga bisa dipublikasikan.
- d. Pengkoordinasian proses sosialisasi dengan program lain berkaitan dengan adanya PNPM Mandiri.
- e. Memperkenalkan kepada konsultan lapangan sejumlah media yang dapat digunakan di lokasi untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi PPK kepada khalayak banyak terutama pada pelaksanaan pelatihan praturgas tambahan.
- f. Mengembangkan media komunikasi yang baru dengan memanfaatkan momen khusus seperti workshop nasional dan pelatihan praturgas.
- g. Berusaha membangun komunikasi yang intens dan menguntungkan dengan media massa baik cetak maupun elektronik.

#### Masalah dan Rekomendasi

Beberapa kendala yang dihadapi selama bulan September 2007 adalah:

- a. Situs internet sudah dapat diakses secara luas namun masih perlu beberapa perbaikan terutama tampilan dan isi data yang ada. Di samping itu masih terdapat error pada situs internet.
- b. Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan program yang disiapkan KIE sehingga upaya pengembangan perlu memanfaatkan momen-momen tertentu.
- c. Organisasi unit yang baru belum efektif berjalan sehingga kendala yang seharusnya tidak perlu terjadi masih dialami.
- d. Belum aktifnya pelaku PPK di daerah untuk mengirimkan foto dan artikel yang dapat diinformasikan ke masyarakat luas selain komitmen yang dibangun pada Rakor bulan Juli 2007 masih belum berjalan maksimal.
- e. Berkurangnya personil FKI terutama di Nanggroe Aceh Darussalam karena beberapa hal.

Atas kendala-kendala tersebut, maka unit KIE telah mencoba untuk mensiasati secara proaktif kendala-kendala yang ada. Namun belum semuanya tercapai dan akan ditindaklanjuti pada bulan berikutnya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah:

- a. Perlu peningkatan dukungan dari Satker PPK dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh unit KIE;
- b. Sudah adanya kepastian organisasi KIE yang baru sudah terbentuk secara resmi;
- c. Bila dimungkinkan adanya realisasi penambahan personil dalam unit IEC dalam waktu yang tidak lama lagi;
- d. Adanya dukungan dari konsultan baik dari tingkat nasional maupun provinsi untuk mendukung proses atau kegiatan yang dijalankan oleh KIE terutama berkaitan dengan komitmen yang dibangun;
- e. Dukungan dari unit lain dalam menyediakan dan mengisi informasi yang ditampilkan oleh situs internet PPK; dan
- f. Perlu dibuat penegasan agar para pelaku PPK lebih aktif dalam memberikan informasi dari lapangan.



## V. PENGELOLAAN KONSULTAN

---

Hingga akhir September 2007, seleksi aktif untuk pengisian posisi kosong KM-Nasional dan Provinsi masih dilakukan. Sedangkan hasil seleksi pada bulan Agustus 2007, belum disampaikan oleh Satker Pusat. Berdasarkan rekapitulasi konsultan, kuota konsultan sebanyak 5.290 orang, konsultan aktif sebanyak 4.686 orang, dan kekosongan sejumlah 604 orang.

Pengelolaan konsultan pada September 2007 masih terkait dengan pengisian posisi kosong untuk struktur baru baik di KM-Nasional maupun KM-Provinsi berupa seleksi aktif di beberapa provinsi. Kegiatan ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dengan PT. Amythas sebagai perusahaan pengelola administrasi. Di samping itu, karena masih adanya kekosongan fasilitator, di tingkat provinsi telah dilakukan rekrutmen yang selanjutnya diselenggarakan Pelatihan Pratugas Gelombang III secara regional. Pasca pelatihan, ternyata kekosongan belum terisi sepenuhnya. Dengan demikian perlu dilakukan identifikasi kembali lokasi (kecamatan) mana yang belum terisi fasilitator sama sekali, termasuk identifikasi dan revisi penambahan fasilitator di Provinsi Papua.

Untuk memantau kualitas kerja konsultan, secara rutin setiap triwulan dilakukan evaluasi kinerja konsultan dan fasilitator dimana pada bulan ini memasuki triwulan III (periode Juli - September 2007). Tim HRD juga berkoordinasi dengan Korprov, Sekretariat Pusat, dan Bank Dunia untuk identifikasi kepastian lokasi BRR Provinsi NAD di samping koordinasi dengan tim dari P2KP dalam rangka menyamakan persepsi mengenai pengelolaan konsultan PNPM.

### V.1. PERKEMBANGAN JUMLAH KONSULTAN

Jumlah konsultan aktif per 1 Oktober 2007 adalah 4.686 orang dari jumlah kuota sebanyak 5.290 orang, sehingga jumlah kekosongan konsultan berjumlah 604 orang. Terjadi peningkatan kekosongan pada bulan ini akibat PHK, pengunduran diri, dan demobilisasi konsultan/fasilitator. Adapun Pelatihan Pratugas FK/FT baru dilaksanakan pada 30 September - 8 Oktober 2007 sehingga FK/FT baru dimobilisasi pada pertengahan Oktober 2007. Selain itu, hasil seleksi untuk posisi di KM-Nasional dan KM-Provinsi hingga saat ini belum ada mobilisasi dari Satker Pusat.

Dari segi kuota, terjadi penurunan karena di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lokasi BRA batal didanai sehingga jumlah lokasi menjadi 201 kecamatan dari 219 kecamatan. Namun, di sisi lain, provinsi Jawa Timur mengalami penambahan jumlah lokasi dari 201 kecamatan menjadi 206 kecamatan. Hal ini disebabkan Pemda kab. Jember yang sebelumnya tidak bersedia menyediakan dana cost sharing (untuk 5 Kecamatan), saat ini telah menyatakan kesediaannya. Adapun komposisi konsultan secara rinci, diuraikan Tabel 33.



Tabel 33. Komposisi Konsultan per September 2007

No.	Posisi	Kuota	Terisi	Kosong
1	Konsultan Manajemen Nasional	52	28	24
2	Konsultan Manajemen Regional	28	13	15
3	Konsultan Manajemen Provinsi	187	116	71
4	Konsultan Manajemen Kabupaten	335	334	1
5	Konsultan Manajemen Teknik	337	327	10
6	Asisten KM-Kab.	2	1	1
7	Pendamping UPK	79	77	2
8	Fasilitator Kecamatan	2139	2056	83
9	Fasilitator Teknik	2063	1701	362
10	Fasilitator Kecamatan Informasi	49	33	16
11	Fasilitator Kecamatan Pendidikan	19	0	19
Jumlah		5.290	4.686	604

## V.2. KEKOSONGAN DAN CADANGAN KONSULTAN

Mengacu pada struktur baru yang telah disampaikan Satker Pusat pada Juli 2007 lalu, kuota konsultan tingkat nasional dan provinsi meningkat. Dari kuota 60 orang KM-Nasional, terjadi kekosongan sebanyak 32 orang dimana pada bulan sebelumnya kekosongan tercatat 31 orang. Penurunan ini akibat sp. P2SPP mengundurkan diri pada awal September 2007. Sedangkan kekosongan KM-Provinsi masih tetap sebanyak 78 orang dari kuota 198 orang. Secara rinci, kekosongan setiap posisi baik pada struktur KM-Nasional maupun KM-Provinsi ditampilkan Tabel 34.

Tabel 34. Komposisi Kekosongan KM-Nasional dan KM-Provinsi

NO.	POSISI	KOSONG	NO.	POSISI	KOSONG
KEKOSONGAN KM-NASIONAL					
1.	Koord. Bid. Pengembangan Program	1	11.	Sp. Manajemen Data PNPMP/PNPMP Generasi	2
2.	Koordinator Wilayah I/II/III/IV/V	5	12.	Ass. Sp. Manajemen Data PNPMP/PNPMP Generasi	2
3.	Sp. Partisipasi Perempuan	1	13.	Sp. Audit Keuangan Wilayah I/III/IV/V/VI	5
4.	Ass. Sp. Sarana/Prasarana Perdesaan	1	14.	Sp. Kredit Keuangan Mikro Wilayah I/II/IV	3
5.	Sp. Kesehatan Masyarakat	1	15.	Sp. Pilot Project P2SPP	1
6.	Sp. HRD	1	16.	Ass. Sp. Pilot Project P2SPP	1
7.	Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah	1	17.	Sp. Pilot Project PNPMP Generasi	1
8.	Ass. Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah	1	18.	Sp. Pilot Project Green KDP	1
9.	Senior Spesialis MIS	1	19.	Sp. Pilot Project SADI	1
10.	Ass. Sp. MIS/Informasi Teknologi	1	20.	Ass. Sp. Pilot Project SADI	1
Total Kekosongan KMN					32



NO.	POSISI	KOSONG	NO.	POSISI	KOSONG
KEKOSONGAN KM-PROVINSI					
1.	Sp. Pilot Project SADI	4	6.	Ass. Sp. MIS PNPM / PNPM Generasi	2
2.	Sp. Monev SADI	4	7.	Sp. FMS	30
3.	Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah	9	8.	Sp. Fasilitator Training	7
4.	Ass. Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah	1	9.	Pembimbing Teknik Papua & Papua Barat	5
5.	Sp. MIS PNPM / PNPM Generasi	15	10.	Sp. Arsitektur Kep. Nias	1
				Total Kekosongan KM-Provinsi	78

Untuk konsultan lapangan (KM-Kab./FK), kekosongan terbanyak per 1 Oktober 2007 secara berurutan terdapat di provinsi NAD (56 orang), Kalimantan Barat (48 orang), Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (40 orang), serta Jawa Barat dan Kalimantan Tengah (34 orang). Sedangkan di provinsi DIY, Bali, dan Nusa Tenggara Timur tidak terjadi kekosongan. Kekosongan konsultan lapang pada bulan ini mengalami peningkatan dari 434 posisi menjadi 494 posisi. Hal ini akibat di beberapa provinsi terjadi pengunduran diri dan PHK konsultan/fasilitator. Sedangkan hasil seleksi aktif Gelombang III belum dapat dimobilisasi karena pada Oktober 2007 baru akan mengikuti Pelatihan Pratugas.

Tabel 35. Komposisi Kekosongan Konsultan Lapangan

No	Posisi	KM-Kab.	KMT	Ass. KM	Pnd. UPK	FK	FT	FKI	FK-Pn	Jumlah
	Jumlah	1	10	1	2	83	362	16	19	494

Kekosongan konsultan diakibatkan karena adanya restrukturisasi di KM-Nasional maupun KM-Provinsi, penambahan lokasi pada PNPM-PPK Tahun 2007, PHK (indisipliner atau kode etik), dan pengunduran diri. Penyebab kekosongan konsultan akibat keluarnya dari program, dapat ditelusuri dari surat PHK, tidak diperpanjang kontrak/demobilisasi, dan pengunduran diri konsultan. Selama September 2007, banyaknya konsultan yang keluar secara detil digambarkan pada Tabel 36. :

Tabel 36. Penyebab Keluarnya Konsultan per September 2007

No	Uraian	KM-Nas	KM-Prov	KM-Kab	KMT	P-UPK	FK	FT	FKI	Jumlah
1	PHK Indisipliner	0	0	0	1	0	2	4	0	7
2	PHK Kode Etik	0	0	0	0	0	1	2	0	3
3	PHK Kinerja Lemah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mengundurkan Diri	1	0	0	0	0	4	8	1	14
5	Demob/Tidak diperpanjang	0	0	0	0	0	22	11	0	33
	Jumlah	1	0	0	1	0	29	25	1	57



Secara kumulatif, jumlah konsultan yang keluar pada periode Januari - September 2007 sebanyak 771 orang dengan alasan: PHK (32 orang), pelanggaran Kode Etik (10 orang), kinerja lemah (2 orang), mengundurkan diri (63 orang), dan demobilisasi/tidak diperpanjang kontrak (664 orang).

#### Pengisian Kekosongan Konsultan

Hingga akhir September 2007, telah terjadi pengisian kekosongan konsultan untuk posisi KM-Kab., KMT, Pendamping UPK, FK, FT, dan FKI dengan total 55 orang. Meskipun demikian, kekosongan belum tertutupi seratus persen, terutama untuk posisi FK dan FT. Perincian kekosongan posisi konsultan ditunjukkan Tabel 37.

Tabel 37. Pengisian Posisi Kosong Konsultan per September 2007

No	Posisi	Kosong awal Sept	Pengisian selama Sept	Kosong awal Okt
1	Konsultan Manajemen Nasional	23	0	24
2	Konsultan Manajemen Regional	15	0	15
3	Konsultan Manajemen Provinsi	71	0	71
4	Konsultan Manajemen Kabupaten	9	7	1
5	Konsultan Manajemen Teknik	9	3	10
6	Asisten KM-Kabupaten	1	0	1
7	Pendamping UPK	7	5	2
8	Fasilitator Kecamatan	49	9	83
9	Fasilitator Teknik	329	28	362
10	Fasilitator Kecamatan Informasi	11	3	16
11	Fasilitator Kecamatan Pendidikan	19	0	19
Jumlah		543	55	604

#### Perkembangan Cadangan Konsultan

Cadangan yang ada pada saat ini berasal dari demobilisasi, hasil pelatihan yang belum di mobilisasi, dan hasil pelatihan praturgus tahun 2007. Jumlah cadangan secara nasional mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu banyak. Peningkatan ini berasal dari demobilisasi FK/FT (untuk lokasi BRA yang batal didanai) yang menjadi cadangan di provinsi NAD.

Banyaknya cadangan KM-Kab., KMT, Pendamping UPK, dan FK secara nasional dapat memenuhi kebutuhan kekosongan yang ada. Namun, tidak semua konsultan/fasilitator bersedia ditempatkan di provinsi lain. Alhasil, kekosongan masih tetap dialami. Sedangkan cadangan untuk posisi Ass. KM-Kab., FT, FKI, dan FKPN secara kumulatif belum memenuhi kebutuhan kekosongan sehingga perlu dilakukan rekrutmen di provinsi masing-masing.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah cadangan konsultan pendamping, adalah: (a) KM-Kabupaten sebanyak 32 orang; (b) KM-Teknik memiliki cadangan 16 orang; (c) Pendamping UPK berjumlah 4 orang; (d) FK dan FT masing-masing 155 dan 66 orang; (e) cadangan FK-Pn sebanyak 11 orang; dan (f) tidak ada cadangan FKI. Jumlah cadangan



FK maupun FT terbanyak masih di provinsi NTT, yaitu sebanyak 49 dan 35 orang. Disusul oleh Jawa Tengah (24 orang FK) dan provinsi Bali (18 orang FT).

### V.3. PERKEMBANGAN REKRUTMEN KONSULTAN

Untuk mengisi kekosongan di tingkat KM-Nasional dan KM-Provinsi telah dilaksanakan seleksi aktif Gelombang I (dari promosi konsultan) dan Gelombang II (dari seleksi eksternal). Hasil seleksi tersebut telah diajukan untuk menempati posisi kosong konsultan dan menunggu SPT dari Satker Pusat. Karena hasil seleksi dua gelombang belum juga memenuhi kekosongan, maka direncanakan pada bulan Oktober 2007 akan dilaksanakan seleksi aktif Gelombang III (dari seleksi eksternal).

Adapun untuk mengatasi kekosongan konsultan lapangan, pada bulan lalu telah dilakukan seleksi aktif di 25 provinsi dimana peserta yang lulus mulai mengikuti Pelatihan Pratugas pada akhir September 2007. Akan tetapi, hasil seleksi aktif menunjukkan bahwa masih terdapat 12 provinsi yang tidak dapat memenuhi kekosongan, yaitu: NAD, Sumatera Utara (Khusus Pulau Nias), Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Untuk itu, perlu koordinasi antar provinsi untuk mengupayakan penempatan konsultan cadangan.

### V.4. MASALAH DAN REKOMENDASI

Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan konsultan, ditemui permasalahan, seperti:

- a. Jalur fungsional belum diterapkan oleh sebagian Korprov, terutama menyangkut pengiriman evaluasi kinerja dan pengendalian konsultan. Korprov tersebut masih mengandalkan perusahaan jasa konsultan. Selain itu, rekapitulasi evaluasi kinerja konsultan lapang, cenderung subyektif karena Korprov kurang memahami mekanisme penilaian (tidak dilakukan pembahasan oleh tiga unsur dan tanpa melakukan umpan balik dari hasil penilaian tersebut).
- b. SOP sebagai dasar pelaksanaan administrasi, masih belum difahami oleh sebagian Korprov, sehingga beberapa kebijakan yang baku tidak dijalankan oleh Korprov.
- c. Beberapa Korprov tidak melakukan verifikasi terhadap pengunduran diri konsultan/fasilitator. Dalam hal ini, Korprov seolah-olah hanya sebagai penyampai surat saja.
- d. Sulitnya mengidentifikasi peserta seleksi aktif Gelombang II (untuk KM-Nasional dan KM-Provinsi) yang berasal dari konsultan aktif berdasarkan hasil evaluasi kinerja, akibat data short list yang dikirim oleh PPA (PT. Amythas) kurang lengkap.
- e. Kekosongan konsultan baik di tingkat KM-Nasional ataupun di KM-Provinsi mengakibatkan beberapa orang merangkap tugas.
- f. Kurangnya validasi data yang dikirim oleh KM-Provinsi.

Adapun rekomendasi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

- a. Korprov diharapkan tetap melakukan jalur fungsional dalam segala hal keputusan, berkaitan dengan kebijakan di lapang dan melaporkan kepada TL KM-Nasional.
- b. Perlu adanya penjelasan ulang atau penegasan perihal SOP dan panduan evaluasi kinerja konsultan yang sudah baku dalam suatu pertemuan khusus.
- c. Kesulitan identifikasi, diantisipasi melalui pemetaan bulanan dari setiap provinsi.
- d. Mengidentifikasi kekosongan secara rutin dan melaporkan hasil identifikasi kekosongan kepada Satker Pusat untuk segera melakukan rekrutmen konsultan.
- e. Terus melakukan edit dan validasi data dari provinsi dan memberikan umpan balik kepada KM-Provinsi terhadap kondisi data yang telah dikirimkan.



## Kemajuan Kegiatan PNPM-PPK per 01 Oktober 2007

No.	Nama Provinsi	MAD I	MD I	Latih KPMD	PG	MKP	MD II	PU	VU	MAD II	MAD III	MD III	Pencairan		Salur Dana	MDST	Jml Kec
													APBD	APBN			
1	Nanggroe Aceh Darussalam	131	128	128	121	118	114	92	74	50	3	0	0	0	0	0	131
2	Sumatera Utara	105	100	99	87	85	85	61	39	34	24	17	13	0	0	0	107
3	Sumatera Barat	58	56	58	55	55	55	55	53	50	35	19	14	0	0	0	58
4	Riau	45	43	41	40	38	38	37	33	30	15	0	0	0	0	0	45
5	Jambi	33	33	33	30	28	28	26	23	22	13	13	12	0	0	0	33
6	Sumatera Selatan	54	54	54	54	53	53	49	46	38	18	16	4	0	0	0	54
7	Bengkulu	33	33	33	32	30	30	21	10	1	0	0	0	0	0	0	33
8	Lampung	51	51	51	51	51	51	51	44	35	31	29	0	0	0	0	51
9	Bangka Belitung	19	19	19	19	18	18	12	7	1	0	0	0	0	0	0	19
10	Kepulauan Riau	18	18	18	16	13	13	11	8	7	5	2	0	0	0	0	18
11	Jawa Barat	89	89	89	89	89	89	89	89	85	44	20	0	0	0	0	89
12	Jawa Tengah	190	190	190	190	190	190	190	190	189	172	140	33	0	0	0	190
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	51	51	51	51	51	51	51	51	49	49	45	0	0	0	0	51
14	Jawa Timur	165	165	165	165	164	164	164	163	155	113	72	25	0	0	0	165
15	Banten	44	44	44	44	42	42	38	33	29	6	6	4	0	0	0	44
16	Bali	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	17	0	0	0	36
17	Nusa Tenggara Barat	47	47	47	47	47	47	47	47	47	44	36	11	0	0	0	47
18	Nusa Tenggara Timur	49	49	49	49	49	49	49	49	49	43	30	17	0	0	0	49
19	Kalimantan Barat	52	43	27	9	9	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	55

## Kemajuan Kegiatan PNPM-PPK per 01 Oktober 2007

No.	Nama Provinsi	MAD I	MD I	Latih KPMD	PG	MKP	MD II	PU	VU	MAD II	MAD III	MD III	Pencairan		Salur Dana	MDST	Jml Kec
													APBD	APBN			
20	Kalimantan Tengah	50	48	47	29	27	26	15	9	7	4	3	0	0	0	0	50
21	Kalimantan Selatan	45	45	45	43	40	39	30	16	11	4	4	4	0	0	0	45
22	Kalimantan Timur	38	31	29	11	10	10	6	6	5	5	4	0	0	0	0	38
23	Sulawesi Utara	34	34	34	34	33	33	33	32	30	5	0	0	0	0	0	34
24	Sulawesi Tengah	44	44	44	42	42	41	38	33	30	22	15	10	0	0	0	44
25	Sulawesi Selatan	99	99	98	98	98	98	94	87	75	23	19	6	0	0	0	99
26	Sulawesi Tenggara	45	45	45	45	45	45	45	44	44	19	13	4	0	0	0	45
27	Gorontalo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	0	0	0	0	7
28	Sulawesi Barat	23	23	23	23	23	23	23	22	22	9	5	2	0	0	0	23
29	Maluku	36	36	36	35	35	35	34	32	31	24	13	4	0	0	0	36
30	Maluku Utara	23	23	23	21	21	21	14	10	4	3	0	0	0	0	0	23
<b>Total 30 Provinsi</b>		<b>1714</b>	<b>1684</b>	<b>1663</b>	<b>1573</b>	<b>1547</b>	<b>1540</b>	<b>1427</b>	<b>1302</b>	<b>1182</b>	<b>780</b>	<b>566</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1719</b>

No.	Nama Provinsi	PTD I	MK I	Pelatihan KPMK	PBM	PU	VU	MK II	PTD II	Pencairan		Penyaluran Dana 100%	MDST	Jumlah Kecamatan
										APBD	APBN			
1	Papua Barat	32	25	11	10	5	1	0	0	0	0	0	0	35
2	Papua	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
<b>Total 2 Provinsi</b>		<b>55</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

## Kemajuan Kegiatan PNPM-PPK per 01 Oktober 2007

No.	Nama Provinsi	MAD I	MD I	Latih KPMD	PG	MKP	MD II	PU	VU	MAD II	MAD III	MD III	Pencairan		Salur Dana	MDST
													APBD	APBN		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	100%	99%	98%	95%	93%	90%	75%	59%	38%	2%	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	98%	96%	93%	86%	86%	85%	64%	39%	32%	22%	18%	12%	1%	-	-
3	Sumatera Barat	100%	99%	100%	97%	97%	97%	95%	94%	86%	60%	41%	26%	2%	13%	12%
4	Riau	100%	99%	91%	89%	88%	88%	85%	73%	67%	33%	11%	-	-	-	-
5	Jambi	100%	100%	100%	99%	97%	96%	81%	72%	67%	39%	39%	36%	16%	19%	19%
6	Sumatera Selatan	100%	100%	100%	100%	99%	99%	95%	90%	70%	33%	31%	7%	-	-	-
7	Bengkulu	100%	100%	100%	100%	99%	99%	85%	43%	3%	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	69%	61%	59%	-	-	-	-
9	Bangka Belitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	37%	5%	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	100%	100%	100%	99%	77%	77%	65%	49%	39%	28%	15%	3%	-	-	-
11	Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	49%	26%	1%	-	-	-
12	Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	91%	78%	20%	-	1%	1%
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	92%	-	0%	-	-
14	Jawa Timur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	94%	68%	51%	17%	0%	1%	1%
15	Banten	100%	100%	100%	100%	99%	98%	92%	77%	66%	14%	14%	9%	2%	-	-
16	Bali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%	-	-	-
17	Nusa Tenggara Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	82%	23%	-	-	-
18	Nusa Tenggara Timur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	73%	36%	1%	3%	3%
19	Kalimantan Barat	95%	91%	49%	25%	17%	17%	16%	16%	16%	16%	15%	3%	-	-	-
20	Kalimantan Tengah	100%	99%	94%	79%	74%	70%	39%	18%	14%	8%	6%	-	-	-	-

## Kemajuan Kegiatan PNPM-PPK per 01 Oktober 2007

No.	Nama Provinsi	MAD I	MD I	Latih KPMD	PG	MKP	MD II	PU	VU	MAD II	MAD III	MD III	Pencairan		Salur Dana	MDST
													APBD	APBN		
21	Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%	99%	98%	81%	40%	24%	9%	9%	9%	-	1%	1%
22	Kalimantan Timur	100%	84%	76%	50%	43%	38%	19%	16%	13%	13%	12%	-	-	-	-
23	Sulawesi Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	88%	15%	1%	-	-	-	-
24	Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	97%	96%	96%	90%	79%	68%	50%	39%	23%	1%	1%	1%
25	Sulawesi Selatan	100%	100%	99%	99%	99%	99%	97%	90%	76%	23%	19%	6%	1%	-	-
26	Sulawesi Tenggara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	42%	34%	9%	-	-	-
27	Gorontalo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29%	29%	-	-	-	-
28	Sulawesi Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	39%	22%	9%	-	-	-
29	Maluku	100%	100%	100%	97%	97%	97%	96%	91%	86%	67%	46%	11%	-	-	-
30	Maluku Utara	100%	100%	100%	92%	92%	92%	64%	49%	17%	13%	6%	-	-	-	-
<b>Rata-rata 30 Provinsi</b>		<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>	<b>84%</b>	<b>74%</b>	<b>64%</b>	<b>40%</b>	<b>32%</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>

No.	Nama Provinsi	PTD I	MK I	Pelatihan KPMK	PBM	PU	VU	MK II	PTD II	Pencairan		Penyaluran Dana 100%	MDST
										APBD	APBN		
1	Papua Barat	91%	80%	31%	43%	23%	11%	6%	-	-	-	-	-
2	Papua	28%	9%	-	6%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-
<b>Rata-rata 2 Provinsi</b>		<b>60%</b>	<b>45%</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>	<b>12%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>